

**Dr. H. A. Rusdiana, M.M.,
Drs. Nasihudin, M.Pd.**

Pengembangan Perencanaan Program Pendidikan

Pengantar **Dr. H. Hasan Basri**



Penerbit **PUSTAKA SETIA** Bandung

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGEMBANGAN PERENCANAAN PROGRAM PENDIDIKAN

ISBN: 978-979-076-715-7

Cet. 1: Januari 2019, 16 cm × 24 cm; xiv + 334 hlm.

Penulis: **Dr. H. A. Rusdiana, M.M., Drs. Nasihudin, M.Pd.**

Desain Sampul: **Tim Desain Pustaka Setia**

Setting, Mountase, Layout: **Tim Redaksi Pustaka Setia**

Cetakan Ke-1: Januari 2019

Diterbitkan oleh:

CV PUSTAKA SETIA

Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164

Telp.: (022) 5210588, Faks.: (022) 5224105

E-mail: pustaka_seti@yahoo.com

BANDUNG - 40253

(Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat)

Copy Right © 2019 **PUSTAKA SETIA**, Bandung

Dilarang memperbanyak atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin penerbit.

Hak penulis dilindungi undang-undang.

All right reserved

KATA PENGANTAR

Dalam memasuki era modern ini, peran pendidikan sangat dominan untuk kelangsungan dalam membangun negara yang kuat dan bermartabat. Pendidikan merupakan tonggak bagi suatu negara karena majunya suatu negara salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan. Pendidikan bertujuan menciptakan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pendidikan juga harus mampu menumbuhkan jiwa patriotik dan rasa kebangsaan nasional. Oleh karena itu, begitu pentingnya pendidikan dalam membangun negara yang kuat maka pemerintah menetapkan dalam satu dasar hukum yang kuat, yaitu undang-undang pendidikan, yang di antaranya ialah Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keteladanan serta akhlak mulia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamandemen kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keteladanan, kecakapan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka menciptakan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan pendidikan serta kesejahteraan umat manusia. Atas dasar itulah peran serta pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan dalam melaksanakan perintah undang-undang maka perlu disusun rencana dan strategi dalam mengembangkan pendidikan yang lebih baik.

Memasuki abad ke-21 peran pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia sangat dominan. Pergaulian antarbangsa telah berkembang menjadi dunia tanpa batas (*borderless world*) sehingga batas geografis, politik, ekonomi, ataupun batas sosial budaya semakin kabur. Hubungan itu berakibat timbul batas-batas, dalam hubungan seperti itu sering terjadi siapa yang lebih siap dan lebih kuat akan menang. Akibatnya, langsung ataupun tidak langsung pihak yang kuat ikut menentukan nasib dan masa depan negara yang kurang siap dan lemah. Kemampuan mendayagunakan potensi sumber daya manusia (SDM) ataupun sumber daya alam (SDA) yang dimiliki dapat menjadi sarana untuk mengurangi ketertinggalan. Upaya pendayagunaan berbagai potensi tersebut membutuhkan waktu jangka panjang (*long term investment*) yang salah satu pilar utamanya adalah melalui pendidikan. Melalui pendidikan dapat dilatih dan dikembangkan keunggulan kompetitif ataupun keunggulan komparatif SDM suatu bangsa.

Persepsi masyarakat mengenai yang baik tersebut belum dapat dituangkan secara terencana dalam hubungan antarbangsa yang dimbidangi mutu, etika. Untuk menjerakkan berbagai tantangan tersebut, paradigma humberan dan sendala harus diubah menjadi paradigma peluang. Pengelolaan pendidikan harus diarahkan untuk menciptakan pendidikan yang bermutu, baik dari segi koreksi, masukan, proses, keluaran, maupun dampaknya (*context, input, process, output, and outcome*). Menurut penulis, pengelolaan pendidikan yang bermutu tentu memerlukan perencanaan yang akurat, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat. Dengan demikian, perlu merumuskan satu rencana dan strategi baru dalam membangun pendidikan.

Sehari setelah itu, saya melihat buku hasil karya buku ini yang merupakan karya terpadu antara ilmu manajemen pendidikan dengan praktik pendidikan untuk dibaca dan dipap oleh mahasiswa S1, S2, dan S3, yang sedang mendalami program ilmu pendidikan dan manajemen pendidikan, selanjutnya untuk dijadikan pegangan dalam merencanakan program pendidikan. Kehadiran buku ini bermanfaat bagi pengembangan pendidikan.

Dr. H. Hasan Basri
Ketua Program Studi Pendidikan Islam (S2) Program Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

PENGANTAR PENULIS

Pencapaian yang bermutu diharapkan dapat menghasilkan SDM yang unggul tidak hanya dalam bidang akademik (aspek kognitif atau aspek otak), tetapi juga unggul secara holistik dalam aspek cipta, rasa (leakdf), kema, kaya, dan bawanyo (pancadarya). Dengan kata lain, pendidikan yang bermutu tersebut mampu menghasilkan manusia yang mampu mengembangkan olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Di sisi lain, manusia yang unggul adalah manusia pertama yang mampu menyeleksi aspek intelektual, emosional dan spiritual mampu mengembangkan berbagai potensi keadanya yang dimiliki secara optimal dan seimbang.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manusia yang unggul adalah manusia yang beriman dan bertakwa, meyakini sepenuhnya eksistensi Allah SWT dan Rasul-Nya, tunduk dan patuh menjalankan segala ketentuan dan aturan-aturan-Nya, cerdas dan beretika mulia, berbudi pekerti luhur yang tidak segan berkarya, tidak tanggung mendptk amatan, mata koreta husat pengabdian-Nya bagi manusia dan kemakmuran, bagi negara dan bangsa. Pendidikan merupakan wahana untuk memuaskan keinginan "memanusiakan manusia" (humanisasi), membuat manusia menjadi berdaya dalam mengembangkan diri keadanya (humanisasi). Pendidikan juga harus memberdayakan manusia (empowering), memandirikan (straightening), dan memulihkan kehidupan manusia (enriching). Pengalaman pendidikan yang bermutu tentu

memerlukan perencanaan yang akurat, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasanyang ketat. Oleh karena itu perlu dikembangkan tata laksana dan strategi baru dalam membangun pendidikan.

Dalam kerangka inilah buku ini hadir sebagai bahan rujukan bagi para mahasiswa, guru, tenaga kependidikan lainnya, dan masyarakat pada umumnya yang memiliki perhatian terhadap pentingnya pendidikan. Dalam bahasannya buku ini diawali dengan Landasan Filosofis, Sejarah, Paradigma, dan Konsep Perencanaan Pendidikan, kemudian berturut-turut disajikan tentang Konsep Dasar Perencanaan Pendidikan, Perencanaan dalam Manajemen Pendidikan, Sistem Perencanaan Pendidikan, Analisis Perencanaan Pendidikan, Rencana Strategi Pengembangan Institut Pendidikan, Rencana Pengembangan Program Sekolah/Madrasah, Rencana Pengembangan SDM Lembaga Pendidikan, Rencana Pengembangan Kurikulum, Rencana Pembelajaran, Rencana Anggaran Biaya Pendidikan, Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan, dan Rencana Pengembangan Kerja Sama Kemitraan Pendidikan. Pada setiap akhir pembahasan dilengkapi model epistemi.

Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan inspirasi memandirikan dan menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan dalam menyusun program perencanaan pendidikan. Semoga buku ini bermanfaat bagi kepentingan umat dan mendapat ridla Allah SWT, amun.

Dr. H. A. Rudianto, M.A.

Dr. Nuzlihudis, M.Pd.

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1	E. Model, Model, dan Proses Perencanaan Pendidikan	74	4. Konsep Dasar RENCANA Pengembangan SDM Pendidikan	111
A. Landasan Filosofis Perencanaan Pendidikan	1	D. Rancangan Instruksional dalam Perencanaan Pendidikan	79	B. Implementasi Perencanaan Pengembangan SDM	113
B. Fungsi Perencanaan Pendidikan	2	BAB 2 SISTEM PERENCANAAN PENDIDIKAN	81	C. Pengembangan SDM Pendidikan	118
C. Hakikat dan Ruang lingkup Perencanaan Pendidikan	6	A. Konsep Dasar Sistem Perencanaan Pendidikan	81	D. Fungsi Perencanaan Pengembangan SDM Pendidikan	140
BAB 2 SUMBER, PRADIKSI, DAN POSISI PERENCANAAN PENDIDIKAN	9	B. Tahapan dan Aspek-aspek dalam Perencanaan Pendidikan	79	BAB 10 BENCANA PENGEMBANGAN KEMERDEKAAN	193
A. Pengertian Perencanaan Pendidikan	9	C. Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional	78	A. Konsep Dasar Pendidikan Pengembangan Kemandirian	198
B. Jenis-jenis Perencanaan Pendidikan	11	D. Fungsi Perencanaan Pendidikan	88	B. Menganalisis Ancaman Pengembangan Kemandirian	202
C. Paradigma Baru Perencanaan Pendidikan	16	BAB 3 ANALISIS PERENCANAAN PENDIDIKAN	95	C. Pengembangan Kemandirian	206
D. Posisi Perencanaan Pendidikan dan Implementasi Rencana Pendidikan	19	A. Analisis Analisis Perencanaan Pendidikan	95	D. Model Perencanaan Pengembangan Kemandirian 2012 (Rudolf)	216
BAB 3 KONSEP DASAR PERENCANAAN PENDIDIKAN	26	B. Perencanaan Pendidikan di Indonesia	97	BAB 11 PERENCANAAN PENBELAJARAN	229
A. Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Perencanaan Pendidikan	26	C. Jenis-jenis Perencanaan Pendidikan	97	A. Konsep Dasar Perencanaan Pembelajaran	229
B. Karakteristik, Prinsip, dan Ruang Lingkup Perencanaan Pendidikan	21	D. Metode, Langkah, Program, dan Model Analisis Perencanaan Pendidikan	100	B. Menganalisis Berbagai Cara Pembelajaran	233
C. Prosedur Perencanaan Pendidikan	36	BAB 7 BENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KEMERDEKAAN PENDIDIKAN	112	C. Langkah-langkah Pelaksanaan Rencana Pembelajaran	235
D. Implementasi dan Proses Perencanaan Pendidikan	61	A. Konsep Dasar Perencanaan Strategis	112	D. Perencanaan Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013	238
BAB 4 PERENCANAAN DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN	43	B. Penerapan atau Pengembangan Perencanaan Strategis	118	BAB 12 BENCANA ANGGARAN BILANGAN PENDIDIKAN	247
A. Perencanaan dalam Manajemen Pendidikan	43	C. Model Perencanaan Pengembangan Strategis Lembaga Pendidikan	120	A. Konsep Dasar Rencana Pendidikan dan Perencanaan Pendidikan	247
B. Perencanaan Perencanaan Pendidikan	46	D. Prosedur, Fungsi, dan Mekanisme Pengukuran Kinerja	124	B. Perencanaan, Pengembangan, dan Pelaksanaan Rencana Pendidikan	255
BAB 5 BENCANA PERENCANAAN SUMBER DAN MANUSIA LEMBAGA PENDIDIKAN	173	BAB 8 BENCANA PENGEMBANGAN PROGRAM BERKUALITAS MANUSIA	199	C. Strategi Perencanaan Rencana Anggaran Pendidikan Berbasis Indikator (RAPS)	270
		A. Konsep Dasar Rencana Pengembangan Program Sekolah/Madrasah	199	D. Perencanaan Anggaran Pendidikan Berbasis Indikator (Mekasih/SAHARA)	281
		B. Fungsi, Fungsi, dan Sistem Rencana Pengembangan Program Sekolah/Madrasah	143	BAB 13 BENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAN PRASARANA PENDIDIKAN	278
		C. Program Pengembangan Sekolah/Madrasah	146	A. Konsep Dasar Perencanaan Pengembangan Sumbar dan Prasarana Pendidikan	280
		D. Langkah-langkah dalam Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah Berbasis	177	B. Fungsi Perencanaan Sumbar dan Prasarana Pendidikan	287
		BAB 9 BENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAN MANUSIA LEMBAGA PENDIDIKAN	173	C. Langkah Perencanaan Sumbar dan Prasarana Pendidikan	287
				D. Program Perencanaan Pengembangan Sumbar dan Prasarana Pendidikan	288

BAB 14 RENCANA PENGEMBANGAN KERJA SAMA KEMITRAAN	
PENDIDIKAN	191
A. Konsep Dasar Perencanaan Program Hubungan Kemitraan.....	192
B. Model Kerja Sama Kemitraan Sekolah.....	195
C. Membangun Program Kemitraan Sekolah dengan Keluarga dan Masyarakat.....	107
D. Desain Strategi Pengembangan Program Kemitraan Sekolah dengan Keluarga dan Masyarakat.....	108
DAFTAR PUSTAKA	125

PENDAHULUAN

BAB 1

Sebuah perencanaan pendidikan dapat dilaksanakan dengan cara yang sesuai jika arah dan tujuan serta efektif dan efisien serta relevan dengan isi dan manfaatnya apabila dilaksanakan dengan mengacu pada dasar yang kokoh, yang dapat mengembangkan serta memberikan perubahan pada pendidikan untuk mencapai suatu tujuan dan arah yang jelas. Dasar yang kokoh di dalam perencanaan ialah yang merupakan pilar utama terhadap perkembangan dalam pendidikan profesional.

Uraian dasar pada Rencana Kerja Berbasis Indonesia adalah landasan atau asas, yaitu dibentol pula sebagai fondasi, yang menjadi pijangannya di dalam perencanaan pendidikan. Hingga sampai pada inisiasi pendidikan awal hingga akhir!

A. Landasan Filosofis Perencanaan Pendidikan

Pendidikan akan dapat dilaksanakan secara mantap, jelas, arah, tujuannya, relevan isi dan manfaatnya, serta efektif dan efisien. Metode dan cara-cara pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan pendidikan apabila dilakukan dengan mengacu pada suatu dasar atau landasan, serta dasar yang kokoh untuk pendidikan. Perencanaan pendidikan memegang peranan penting untuk mengembangkan serta memacu keberhasilan

1. C. Supriat, *Usaha Nasional, Jalanan Universitas Pendidikan Indonesia*, (2004) hlm. 20.

tujuan pendidikan. Untuk itu, diperlukan dasar filosofis yang akan memervitukan tujuan perencanaan pendidikan itu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai.

Dasar filosofis sangat berperan penting dalam proses di dalam perencanaan pendidikan untuk menuju arah, tujuan, dan suatu perkembangan perubahan pada pendidikan. Dasar filosofis ini bersumber pada filsafat pendidikan.

Dalam pandangan Arief, dasar filosofis adalah landasan yang bersumber dalam filsafat pendidikan yang menyangkut dalam segala aspek dari keyakinan, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, sumber nilai serta kehidupan lebih baik dijalankan.¹

Dasar atau landasan filosofis ini, bersumber pada filsafat pendidikan, yaitu yang menyangkut segala aspek keyakinan, hakikat, sumber pengetahuan dan cenderung untuk menuju pada masa depan yang akan datang.

Perencanaan atas dasar filosofis secara efektif dan efisien serta arah tujuan yang tepat dan dibantu oleh suatu konsep interaksif/ timbal balik antara satu dan lainnya, baik pada lingkungan sekolah maupun masyarakat, merupakan faktor pengembangan pendidikan yang lebih baik. Pada dasar filosofis perencanaan pendidikan itu juga termasuk pada dasar yuridis. Dasar yuridis adalah peraturan baku, yaitu tempat berpijak/bertolak dalam melaksanakan kegiatan tertentu.

Menurut Arief, dasar filosofis ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:²

1. Ontologi (Apa)

Ontologi, yaitu asas dalam menetapkan ruang lingkup, wujud yang menjadi objek pengetahuan/objek formal serta penafian tentang hakikat realitas dan objek tersebut.

2. Epistemologi (Bagaimana)

Epistemologi, yaitu asas mengenai cara memperoleh dan menyusun materi pengetahuan menjadi tubuh pengetahuan (objek formal dan material ilmu pendidikan).

1. Mubandazul Arief, *Filsafat Pendidikan*, (Dit. di STAIN Kediri Press, 2013, hlm. 24).

2. Mubandazul Arief, *Filsafat Pendidikan*, (Dit. di STAIN Kediri Press, 2013, hlm. 24).

3. Aksiologi (Untuk Apa)

Aksiologi, yaitu asas yang menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dan disusun dalam tubuh pengetahuan tersebut tentang hakikat nilai kegunaan teoretis dan praktis ilmu pendidikan.

Sebuah perumusan tujuan, sekurang-kurangnya dalam pendidikan mulai dari konsep perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi membutuhkan pemikiran yang filosofis.³

Dari pemahaman pada pemaparan dasar filosofis ini terdapat, peranan penting untuk perencanaan pendidikan, antara lain:

- asumsi-asumsi yang menjadi titik-tumpu/tolak dalam rangka studi dan praktik teori pada pendidikan;
- simbol-simbol yang seharusnya diabaikan pada pendidikan;
- benefit filsafat, yaitu suatu pendekatan yang telah komprehensif, skalafit, dan normatif;
- penetapan asumsi pada perencanaan pendidikan secara tepat;
- memperkuat pada pengendalian sebagai alat pengembangan perubahan pendidikan dalam perencanaan.

Pentingnya peranan dasar filosofis pada perencanaan pendidikan itu perlu diperhatikan. Dari berbagai asumsi itu berasal dari suatu sumber yaitu agama, filsafat, dan hukum atau biasa disebut yuridis. Ciri-ciri dari jenis dasarnya, filosofis juga sama dan termasuk pada dasar hukum/yuridis, seperti apa yang telah dipaparkan pada paragraf satu, perwujudan dasar yuridis di dalam pendidikan.

B. Falsafah Perencanaan Pendidikan

Sart (ini terjadi) penggerak falsafah dalam perencanaan, yaitu dari perencanaan yang diibaratkan pada istilah *creating the future from the past* atau *plan forward* ke falsafah baru, yaitu *creating the future from the future* atau *plan backward*.

Perencanaan falsafah *creating the future from the past* berimplikasi bahwa apa yang terjadi pada masa lalu akan terjadi lagi pada masa akan datang. Oleh karena itu, perencanaan dengan falsafah *creating the future*

3. Mubandazul Arief, *Filsafat Pendidikan*, (Dit. di STAIN Kediri Press, 2013, hlm. 24).

SEJARAH, PARADIGMA, DAN POSISI PERENCANAAN PENDIDIKAN



Berkaitan dengan dunia pendidikan, perencanaan berperan penting dalam menetapkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Perencanaan pendidikan sangat penting dan bermanfaat sebagai petunjuk, arahan, konsep dalam mencapai suatu tujuan. Perencanaan pendidikan dilakukan dengan beberapa jenis atau tahapan.

Perencanaan pendidikan juga memperlebar lingkup pendidikan, antara lain pendanaan, kebutuhan sosial, kepemimpinan, manfaat dan daya dan integrasi.

A. Pengertian Perencanaan Pendidikan

Pada dasarnya, kajian tentang perencanaan adalah terkait dengan konsep manajemen dan administrasi. Hal ini dapat dipahami karena dalam manajemen maupun administrasi, perencanaan merupakan hal yang utama dan pertama.¹

Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan administratif. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan, bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada perencanaan dan seluruh kegiatan administratif itu berlangsung.

1. Heryanto, *Manajemen Organisasi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hal. 10.

Menurut Heryanto (2013), perencanaan adalah perbandingan dan pemertimbangan antara yang diusahakan dalam mencapai tujuan tertentu, yang yang dilaksanakan pada saat dan di masa mendatang.

Perencanaan adalah art efektif yang adalah proses menetapkan kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan, untuk merealisasikan tujuan tertentu, yang dilaksanakan secara sistematis terhadap masa dan waktu dan dibarengi pada saat yang akan datang, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dasar terbagi sebagai berikut, terbagi hal yang dapat menjadi pertimbangan terhadap dan diwujudkan pada waktu, yaitu:

1. terbagi dengan masa dan waktu
2. kompleksitas
3. aspek yang ada
4. terbagi dengan waktu

Selanjutnya dengan memahami beberapa hal berikut dengan pengertian perencanaan adalah, terbagi dengan waktu dan perencanaan, yaitu:

1. perantara pendidikan dan program
2. kompleksitas pendidikan dan waktu
3. dan hal yang berkaitan dengan waktu
4. waktu untuk mencapai secara efektif dan efisien.

Adapun pendidikan merupakan dasar yang dapat mempercepat perkembangan potensi manusia untuk memperoleh hasil yang diharapkan pada masa.

Pendidikan dapat memperoleh berbagai perkembangan seperti, kreatif, inovatif, mandiri, dan lain-lain, untuk itu diperlukan rencana.

Pendidikan dapat pula dipelajari sebagai ilmu dengan menggunakan yang ada berdasarkan dan menggunakan sebagai berikut:

1. sebagai proses yang memiliki antara dan lainnya untuk berkembang dan berkembang berdasarkan hal.

1. Heryanto, *Manajemen Organisasi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hal. 11.
2. Dan Heryanto, *Manajemen Organisasi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hal. 11.
3. Heryanto, *Manajemen Organisasi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hal. 11.

1. sebagai proses yang memiliki antara dan lainnya untuk berkembang dan berkembang berdasarkan hal.
2. sebagai proses yang memiliki antara dan lainnya untuk berkembang dan berkembang berdasarkan hal.
3. sebagai proses yang memiliki antara dan lainnya untuk berkembang dan berkembang berdasarkan hal.
4. sebagai proses yang memiliki antara dan lainnya untuk berkembang dan berkembang berdasarkan hal.
5. sebagai proses yang memiliki antara dan lainnya untuk berkembang dan berkembang berdasarkan hal.

Adapun perencanaan pendidikan merupakan suatu rencana atau program yang akan dilaksanakan dalam pendidikan tersebut. Dalam buku Heryanto (2013), perencanaan pendidikan, secara khusus perencanaan adalah hal yang terbagi, yang memiliki yang merupakan art efektif dan efisien. Perencanaan pendidikan adalah kegiatan yang memiliki dan lain-lain, untuk itu diperlukan rencana. Perencanaan pendidikan adalah kegiatan yang memiliki dan lain-lain, untuk itu diperlukan rencana. Perencanaan pendidikan adalah kegiatan yang memiliki dan lain-lain, untuk itu diperlukan rencana.

1. sebagai proses yang memiliki antara dan lainnya untuk berkembang dan berkembang berdasarkan hal.

"... it is a process of identifying and planning in the process of providing decision for action in the field of educational development is the function of educational planning" yang berarti bahwa perencanaan pendidikan adalah proses memperkirakan kegiatan pada masa depan dengan melihat perkembangan pendidikan untuk dapat hal perencanaan pendidikan.

1. Menurut Heryanto (2013), perencanaan

"... it is a process of identifying and planning in the process of providing decision for action in the field of educational development is the function of educational planning" yang berarti bahwa perencanaan pendidikan adalah proses memperkirakan kegiatan pada masa depan dengan melihat perkembangan pendidikan untuk dapat hal perencanaan pendidikan.

1. Heryanto, 2013, hal. 11.

oleh pihak lain yang diperlukan seperti kepala sekolah, atau pengawas sekolah.

(d) Teknik dan alat pemantauan

Teknik pemantauan rencana pendidikan, terdiri atas:

- 11) teknik pengamatan, daftar cek, atau skala bertingkat;
- 12) teknik wawancara;
- 13) catatan lapangan;
- 14) alat perekam elektronik.

Evaluasi pada dasarnya merupakan suatu aktivitas pengendalian yang memungkinkan intervensi yang positif. Evaluasi merupakan kegiatan memeriksa arah yang diambil dan mengevaluasi hasil ataupun penyimpangan dari perencanaan sebelumnya. Penilaian dan pengujian keabsahan yang berdasarkan pengalaman terdahulu merupakan satu kecenderungan sebagai tahap dalam proses perencanaan. Evaluasi harus bersifat komprehensif dan terbuka terhadap berbagai kritik walaupun kemampuan manusia dalam menguasai sesuatu memiliki beberapa keterbatasan.

Teknik evaluasi dalam evaluasi rencana pada dasarnya mirip dengan teknik pemantauan, yang dapat dilakukan oleh: (1) guru kelas; (2) kepala sekolah; (3) peneliti sekolah/pjaban birokrasi; (4) peneliti sebagai mitra kolaborasi. Perbedaan mendasar antara pemantauan dan evaluasi ialah bahwa pemantauan memusatkan perhatian pada proses pelaksanaan rencana, sedangkan evaluasi pada hasil yang dicapai setelah satu tahapan rencana dipandang memadai.

Ada lima hal penting dalam setiap aktivitas pendidikan, yang merupakan poin penting dalam proses evaluasi, yaitu: (1) tempat aktivitas dilakukan; (2) waktu aktivitas dilakukan; (3) orang yang terlibat dalam aktivitas; (4) sumber daya yang diperlukan untuk aktivitas tersebut; (5) proses pelaksanaan aktivitas. Evaluasi perencanaan yang sedang berjalan menandai berakhirnya siklus proses perencanaan pendidikan.¹²⁷

KONSEP DASAR PERENCANAAN PENDIDIKAN

BAB 3

Ada enam konsep penting yang perlu dipahami dalam mengawal tujuan atau pembatasan tentang konsep perencanaan pendidikan, antara lain: pengertian perencanaan pendidikan; tujuan perencanaan pendidikan; manfaat perencanaan pendidikan; karakteristik perencanaan pendidikan; prinsip-prinsip perencanaan pendidikan; proses atau tahapan penyusunan perencanaan pendidikan.

A. Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Perencanaan Pendidikan

Konsep penting yang perlu dipahami tentang konsep perencanaan pendidikan, yaitu sebagai berikut.

1. Pengertian Perencanaan Pendidikan

Suatu kegiatan pasti dilakuk dengan sebuah rencana. Demikian pula, dalam dunia pendidikan. Dalam bidang pendidikan, perencanaan merupakan salah satu faktor kunci efektivitas keberhasilan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan bagi setiap jenjang dan jenis pendidikan pada tingkat nasional ataupun lokal.¹²⁸

127. John Dewey in: Suci dan Alim, *Sumardi, M. dkk., Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 2.

2. Memudahkan revisi program layanan pendidikan dan proses penyelenggaraan perencanaan pendidikan berikutnya sesuai dengan dinamika dan perkembangan kehidupan sosial-budaya.

Menurut Aswari, hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan perencanaan pendidikan yaitu¹⁴

1. mengutamakan nilai-nilai manusia;
2. memberikan kesempatan untuk mengembangkan segala potensi peserta didik seoptimal mungkin;
3. memberikan kesempatan kepada peserta didik;
4. mengkehendaki sistematis terpadu serta terencana logis dan rasional;
5. berorientasi kepada perkembangan kualitas daya manusia;
6. dikembangkan dengan memperhatikan keterkaitan dengan berbagai komponen pendidikan secara sistematis;
7. menggunakan sumber daya seoptimal mungkin karena sumber daya yang tersedia terbatas;
8. berorientasi pada masa datang;
9. responsif terhadap kebutuhan yang berkembang di tingkat masyarakat;
10. mengencangkan inovasi pendidikan hingga pembaharuan terus menerus.¹⁵

¹⁴ Aswari, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: CV Alfabeta, 2006, hal. 31.

PERENCANAAN DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN



Perencanaan dalam lembaga pendidikan merupakan hal utama dalam fungsi manajemen. Hal ini disebabkan kegagalan dalam perencanaan pendidikan berarti kegagalan dalam mewujudkan tujuan pendidikan.

Para pakar manajemen mengatakan bahwa apabila perencanaan tidak sesuai dan ditukuk dengan benar, sebagian pekerjaan besar telah selesai dilaksanakan. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang menentukan secara jelas pemilahan pekerjaan yang harus dilakukan oleh para pelaksana dalam satu kurun waktu tertentu dan mengarah pada tujuan-bujuan yang telah ditentukan.

Perencanaan dalam manajemen pendidikan merupakan kunci utama dalam aktivitas berkegiatan. Artinya lain tidak akan berjalan dengan baik, bahkan mungkin gagal jika tidak ditahului oleh perencanaan. Tanpa perencanaan, semua aktivitas dalam pendidikan dilakukan berjalan dengan baik.

A. Perencanaan dalam Manajemen Pendidikan

1. Tujuan Perencanaan dalam Manajemen Pendidikan¹

Salah satu aspek penting dalam manajemen pendidikan adalah bagaimana merencanakan sistem pendidikan merupakan salah satu tingkat

¹ T. Pratiwi, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: PT-CITRA, 1982, hal. 33.

SISTEM PERENCANAAN PENDIDIKAN

BAB 5

Perencanaan pendidikan adalah salah satu instrumen strategi dalam upaya mengoptimalkan sumber daya manusia yang andal sebagai praloka pembangunan sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Selain fungsi tersebut, perencanaan pendidikan dapat menjadi penghubung antara harapan orang banyak, masyarakat, peserta didik, dan negara dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi pendidikan.

Pendekatan dalam perencanaan pendidikan dimaksudkan untuk memenuhi pemenuhan masyarakat, kebutuhan tenaga kerja, dan nilai balik pendidikan serpadu dengan segala aspeknya dapat merupakan alternatif perencanaan yang dapat memadukan ketiga pendekatan tersebut. Artinya, penerapan praktik pendekatan sistem akan dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas para pelaku pendidikan dalam proses belajar mengajar.

A. Konsep Dasar Sistem Perencanaan Pendidikan

1. Konsep Sistem

Makna Sistem

Secara etimologi kata "sistem" awalnya berasal dari bahasa Yunani *kytēma* dan bahasa Latin *systema*. Sistem adalah kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung membentuk keseluruhan yang kompleks. Dalam Romat

dan lain-lain, sistem diartikan bahwa sistem ialah TI kompleks atau yang dapat terdiri atas beberapa anggota membentuk suatu kesatuan. TI adalah TI manusia yang terdiri dari pendidikan, seni, dan sebagainya. TI adalah TI teknik.

Di dalam suatu sistem, sistem sebagai suatu yang mempunyai arti tertentu yang dimaksudkan oleh satu or elemen yang termasuk, mengorganisasikan kesatuan unit, meliputi elemen-elemen yang berinteraksi yang semuanya berinteraksi untuk mencapai tujuan yang tetap.

Berikut ini beberapa definisi yang relevan yang berkaitan dengan definisi sistem. Menurut Hirsch (1980) mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan bagian-bagian atau sub-sistem yang berinteraksi dan berinteraksi untuk menghasilkan tujuan.

Sistem adalah suatu sistem yang berinteraksi sebagai suatu kesatuan yang mempunyai arti, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, yang berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Hirsch (1980) mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan bagian-bagian atau sub-sistem yang berinteraksi dan berinteraksi untuk menghasilkan tujuan.

Menurut Hirsch (1980) mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan bagian-bagian atau sub-sistem yang berinteraksi dan berinteraksi untuk menghasilkan tujuan. Menurut Hirsch (1980) mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan bagian-bagian atau sub-sistem yang berinteraksi dan berinteraksi untuk menghasilkan tujuan.

Sistem adalah suatu sistem yang berinteraksi sebagai suatu kesatuan yang mempunyai arti, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, yang berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Hirsch (1980) mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan bagian-bagian atau sub-sistem yang berinteraksi dan berinteraksi untuk menghasilkan tujuan.

1. Hirsch (1980) mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan bagian-bagian atau sub-sistem yang berinteraksi dan berinteraksi untuk menghasilkan tujuan.

2. Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem merupakan cara berpikir dengan menggunakan logika sistem. Cara berpikir dan berorganisasi menggunakan logika sistem adalah cara berpikir yang menggunakan logika sistem untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan sistem adalah cara berpikir yang menggunakan logika sistem untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Logika sistem merupakan salah satu pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan sistem adalah cara berpikir yang menggunakan logika sistem untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

1. Sistem Perencanaan Pendidikan

Sistem perencanaan pendidikan adalah analisis terhadap suatu perencanaan yang memenuhi kebutuhan, yaitu tindakan terorganisir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan nilai, nilai dan tujuan pendidikan menurut logika dan prosedur ilmiah. Menurut Hirsch (1980) mendefinisikan sistem sebagai suatu sistem yang berinteraksi sebagai suatu kesatuan yang mempunyai arti, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, yang berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Hirsch (1980) mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan bagian-bagian atau sub-sistem yang berinteraksi dan berinteraksi untuk menghasilkan tujuan.

Sistem perencanaan adalah suatu sistem yang berinteraksi sebagai suatu kesatuan yang mempunyai arti, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, yang berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Hirsch (1980) mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan bagian-bagian atau sub-sistem yang berinteraksi dan berinteraksi untuk menghasilkan tujuan.

Langkah perencanaan adalah merencanakan kegiatan yang akan dilakukan, menetapkan tujuan yang akan dicapai, menentukan sumber daya yang akan digunakan, dan menetapkan prosedur yang akan digunakan. Menurut Hirsch (1980) mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan bagian-bagian atau sub-sistem yang berinteraksi dan berinteraksi untuk menghasilkan tujuan.

1. Hirsch (1980) mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan bagian-bagian atau sub-sistem yang berinteraksi dan berinteraksi untuk menghasilkan tujuan.

a. Pengertian Rencana Kerja Sekolah/Madrasah

- 1) Proses menentukan tindakan masa depan sekolah/madrasah yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya.
- 2) Dokumen gambaran kegiatan sekolah/madrasah pada masa depan untuk mencapai tujuan dan sasaran sekolah/madrasah yang telah ditetapkan.

b. Tujuan Penyusunan RKS/M

- 1) Menjamin agar tujuan dan sasaran sekolah/madrasah dapat dicapai.
- 2) Mendukung koordinasi antarpejabat sekolah/madrasah.
- 3) Menjalin kemitranya integral, sistematis, dan dinamis baik secara internal di sekolah/madrasah, antarskolah/madrasah, dan di kabupaten/kota/provinsi, kementerian, dan pemerintah/provinsi dan internasional.
- 4) Menjalin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 5) Mengoptimalkan partisipasi warga sekolah/madrasah dan masyarakat.
- 6) Menjamin penggunaan sumber daya sekolah/madrasah yang ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, berkelanjutan, serta memperhatikan kelestarian gender.

c. Matriks Penyusunan RKS/M

Sistematika penyusunan RKS/M, yaitu sebagai berikut:

- 1) penentuan (atau kelengkapan) tujuan, sasaran, dasar hukum, visi/misi dan penyempitannya;
- 2) identifikasi kondisi sekolah/madrasah saat ini;
- 3) identifikasi kondisi sekolah/madrasah masa depan yang diharapkan;
- 4) penentuan program dan kegiatan;
- 5) penentuan rencana anggaran sekolah/madrasah;
- 6) penentuan RKI dan RKAS/M.¹⁷⁷

ANALISIS PERENCANAAN PENDIDIKAN

BAB 6

Analisis sistem adalah cara berpikir berdasarkan teori umum sistem. Teori umum sistem menurut Boulding merupakan kerangka ilmu pengetahuan yang dapat menyajikan suatu struktur teoritis secara sistematis, tempat berbagai disiplin diartikan, diintegrasikan, dan diayuturakan secara produktif. Ia menggunakan bahasa tujuan utama teori umum sistem adalah mengembangkan konsep-konsep yang berlaku umum yang memungkinkan seorang spesialis dapat berkomunikasi secara terdindingan, spesialis yang bidang ilmunya berbeda.

Dalam konteks yang sama, Bertalanffy (1970) mengemukakan bahwa ilmu umum sistem merupakan suatu konsep yang bersifat menyeluruh yang memandang sesuatu secara keseluruhan, dan keseluruhan itu lebih penting daripada dari pada jumlah bagian-bagiannya. Bertalanffy menyebutkan lima tujuan utama teori umum sistem, yaitu:

- a. berdasarannya mengintegrasikan berbagai ilmu alamiah dan ilmu sosial;
- b. pengintegrasian itu dampaknya berpusat pada teori umum sistem;
- c. teori-teori di atas mungkin merupakan instrumen penting dalam bidang ilmu sosial;

¹⁷⁷ H. Boulding, *The Ecopsychology of Man* (University of Michigan Press, 1969), hlm. 108.

¹⁷⁸ Hirsch & Van der Venne, *Perencanaan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 11-12.

j. Implementasi Rencana

Fase ini sudah sampai pada pelaksanaan rencana yang disusun. Implementasi ini mulai dilakukan apabila tiap-tiap proyek yang diusulkan sudah disahkan. Oleh karena itu, kerangka organisasi untuk berbagai proyek dikembangkan berdasarkan biaya tahunan. Di samping itu, dikembangkan rencana operasionalnya seperti pendelegasian wewenang, penugasan tanggung jawab, pengadaan mekanisme umpan balik dan pengawasannya.

k. Evaluasi Rencana

Kegiatan mengevaluasi rencana berkaitan dengan kemajuan/perkembangan dan penemuan penyimpangan dalam pelaksanaan suatu rencana. Penilaian yang dilakukan juga bermanfaat untuk melihat rangkalan kegiatan dalam proses perencanaan.

l. Revisi Rencana

Revisi rencana dilakukan berdasarkan hasil evaluasi rencana untuk memperbaiki, melengkapi, atau menyempurnakan rencana yang akan datang berdasarkan pengalaman masa lalu (rencana yang sudah dilaksanakan).

3. Model Skenario Masa Depan Analisis dan Perumusan Tujuan dalam Perencanaan Pendidikan

Skenario masa depan Indonesia telah ditulis oleh beberapa ahli, di antaranya Sumitro Djojohadikusumo yang menyebutkan bahwa skenario dimulai dari asumsi bahwa pertumbuhan penduduk merupakan faktor pokok dalam dinamika pembangunan yang dilaksanakan Indonesia.¹²

Dalam dokumen kebijakan dasar pengembangan pendidikan tinggi (Keputusan Menteri P & K nomor. 0140/U/1975 tanggal 20 Juli 1975) dinyatakan bahwa tanggung jawab pendidikan tinggi adalah mengembangkan kemampuan serta kecakapan mahasiswa serta masyarakat untuk mampu berpikir dengan berorientasi kepada kepentingan bangsa serta kemanusiaan, baik pada waktu sekarang maupun pada masa yang akan datang, dengan menggunakan pola-pola

12 Sumitro Djojohadikusumo, *Indonesia Dalam Perkembangan Kini dan Masa Depan*, Jakarta: LP3ES, 1975, hlm. 13.

objektif, kritis, analitis, yang dapat menghasilkan persepsi dan konsepsi yang tepat. Dalam kebijaksanaan dasar pengembangan pendidikan tinggi ditentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi sebagai berikut: "Dengan berlandaskan pada dasar-dasar tersebut dan berpedoman pada konsep pendidikan seumur hidup, pembinaan serta pengembangan perguruan tinggi harus terarah.

Pengarahan pada dasarnya ditujukan pada pengembangan suatu sistem pendidikan tinggi di Indonesia secara menyeluruh yang menyangkut perguruan tinggi pemerintah dan pola pembinaan, dengan arahan berikut.

- Pendidikan tinggi harus merupakan bagian integral dari usaha-usaha pembangunan, baik nasional maupun regional.
- Pendidikan tinggi harus merupakan penghubung antara dunia ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
- Pendidikan tinggi harus melaksanakan pendidikan berdasarkan pola-pola pemikiran yang analitis dan berorientasi kepada pemecahan-pemecahan permasalahan dan disertai oleh suatu pandangan masa depan.
- Pendidikan tinggi harus berpartisipasi dalam perbaikan serta perkembangan: (1) mutu kehidupan dan kebudayaan; (2) ilmu pengetahuan dan penerapannya; (3) pengertian dan kerja sama internasional dalam usaha mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan tinggi hendaknya memungkinkan terlaksananya: (1) pembangunan seluruh kemampuan serta kepribadian manusia; (2) mobilitas siswa dari satu pengalaman pendidikan yang lain; (3) diversifikasi dalam pendidikan dan proses belajar; (4) demokratisasi dalam pendidikan dan proses belajar; (5) mobilisasi sumber-sumber masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan; (6) pertumbuhan kegairahan riset".¹³

j. Implementasi Rencana

Fase ini sudah sampai pada pelaksanaan rencana yang disusun. Implementasi ini mulai dilakukan apabila tiap-tiap proyek yang diusulkan sudah disahkan. Oleh karena itu, kerangka organisasi untuk berbagai proyek dikembangkan berdasarkan biaya tahunan. Di samping itu, dikembangkan rencana operasionalnya seperti pendelegasian wewenang, penugasan tanggung jawab, pengadaan mekanisme umpan balik dan pengawasannya.

k. Evaluasi Rencana

Kegiatan mengevaluasi rencana berkaitan dengan kemajuan/perkembangan dan penemuan penyimpangan dalam pelaksanaan suatu rencana. Penilaian yang dilakukan juga bermanfaat untuk melihat rangkalan kegiatan dalam proses perencanaan.

l. Revisi Rencana

Revisi rencana dilakukan berdasarkan hasil evaluasi rencana untuk memperbaiki, melengkapi, atau menyempurnakan rencana yang akan datang berdasarkan pengalaman masa lalu (rencana yang sudah dilaksanakan).

3. Model Skenario Masa Depan Analisis dan Perumusan Tujuan dalam Perencanaan Pendidikan

Skenario masa depan Indonesia telah ditulis oleh beberapa ahli, di antaranya Sumitro Djojohadikusumo yang menyebutkan bahwa skenario dimulai dari asumsi bahwa pertumbuhan penduduk merupakan faktor pokok dalam dinamika pembangunan yang dilaksanakan Indonesia.¹²

Dalam dokumen kebijakan dasar pengembangan pendidikan tinggi (Keputusan Menteri P & K nomor. 0140/U/1975 tanggal 20 Juli 1975) dinyatakan bahwa tanggung jawab pendidikan tinggi adalah mengembangkan kemampuan serta kecakapan mahasiswa serta masyarakat untuk mampu berpikir dengan berorientasi kepada kepentingan bangsa serta kemanusiaan, baik pada waktu sekarang maupun pada masa yang akan datang, dengan menggunakan pola-pola

12. Sumitro Djojohadikusumo, *Indonesia Dalam Perkembangan Kini dan Masa Depan*, Jakarta: LPSES, 1975, hlm. 13.

objektif, kritis, analitis, yang dapat menghasilkan persepsi dan konsepsi yang tepat. Dalam kebijaksanaan dasar pengembangan pendidikan tinggi ditentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi sebagai berikut: "Dengan berlandaskan pada dasar-dasar tersebut dan berpedoman pada konsep pendidikan seumur hidup, pembinaan serta pengembangan perguruan tinggi harus terarah.

Pengarahan pada dasarnya ditujukan pada pengembangan suatu sistem pendidikan tinggi di Indonesia secara menyeluruh yang menyangkut perguruan tinggi pemerintah dan pola pembinaan, dengan arahan berikut.

- Pendidikan tinggi harus merupakan bagian integral dari usaha-usaha pembangunan, baik nasional maupun regional.
- Pendidikan tinggi harus merupakan penghubung antara dunia ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
- Pendidikan tinggi harus melaksanakan pendidikan berdasarkan pola-pola pemikiran yang analitis dan berorientasi kepada pemecahan-pemecahan permasalahan dan disertai oleh suatu pandangan masa depan.
- Pendidikan tinggi harus berpartisipasi dalam perbaikan serta perkembangan: (1) mutu kehidupan dan kebudayaan; (2) ilmu pengetahuan dan penerapannya; (3) pengertian dan kerja sama internasional dalam usaha mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan tinggi hendaknya memungkinkan terlaksananya: (1) pembangunan seluruh kemampuan serta kepribadian manusia; (2) mobilitas siswa dari satu pengalaman pendidikan yang lain; (3) diversifikasi dalam pendidikan dan proses belajar; (4) demokratisasi dalam pendidikan dan proses belajar; (5) mobilisasi sumber-sumber masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan; (6) pertumbuhan kegairahan riset".¹³

j. Implementasi Rencana

Fase ini sudah sampai pada pelaksanaan rencana yang disusun. Implementasi ini mulai dilakukan apabila tiap-tiap proyek yang diusulkan sudah disahkan. Oleh karena itu, kerangka organisasi untuk berbagai proyek dikembangkan berdasarkan biaya tahunan. Di samping itu, dikembangkan rencana operasionalnya seperti pendelegasian wewenang, penugasan tanggung jawab, pengadaan mekanisme umpan balik dan pengawasannya.

k. Evaluasi Rencana

Kegiatan mengevaluasi rencana berkaitan dengan kemajuan/perkembangan dan penemuan penyimpangan dalam pelaksanaan suatu rencana. Penilaian yang dilakukan juga bermanfaat untuk melihat rangkaian kegiatan dalam proses perencanaan.

l. Revisi Rencana

Revisi rencana dilakukan berdasarkan hasil evaluasi rencana untuk memperbaiki, melengkapi, atau menyempurnakan rencana yang akan datang berdasarkan pengalaman masa lalu (rencana yang sudah dilaksanakan).

3. Model Skenario Masa Depan Analisis dan Perumusan Tujuan dalam Perencanaan Pendidikan

Skenario masa depan Indonesia telah ditulis oleh beberapa ahli, di antaranya Sumitro Djojohadikusumo yang menyebutkan bahwa skenario dimulai dari asumsi bahwa pertumbuhan penduduk merupakan faktor pokok dalam dinamika pembangunan yang dilaksanakan Indonesia.¹²

Dalam dokumen kebijakan dasar pengembangan pendidikan tinggi (Keputusan Menteri P & K nomor. 0140/U/1975 tanggal 20 Juli 1975) dinyatakan bahwa tanggung jawab pendidikan tinggi adalah mengembangkan kemampuan serta kecakapan mahasiswa serta masyarakat untuk mampu berpikir dengan berorientasi kepada kepentingan bangsa serta kemanusiaan, baik pada waktu sekarang maupun pada masa yang akan datang, dengan menggunakan pola-pola

12. Sumitro Djojohadikusumo, *Indonesia Dalam Perkembangan Kini dan Masa Depan*, Jakarta: LP3ES, 1975, hlm. 13.

RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN

BAB 7

Perencanaan strategis merupakan bagian dari proses manajemen strategis yang terkait dengan proses identifikasi tujuan jangka panjang dari sebuah lembaga atau organisasi, penggalian gagasan dan pilihan-pilihan, pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan pemantauan (*monitoring*) kemajuan atau kegagalan dalam rangka menentukan strategi pada masa depan.¹

Secara historis, perencanaan strategis bermula dari dunia militer. Pada perkembangan selanjutnya, perencanaan strategis diadopsi oleh dunia usaha pada tahun 1950-an dan berkembang pesat dan sangat populer pada tahun 1960 hingga 1970-an, dan berkembang kembali tahun 1990-an sebagai "*process with particular benefits in particular contexts*."²

Dalam dunia pendidikan, penerapan perencanaan strategis berkembang sekitar satu dekade yang lalu ketika lembaga-lembaga pendidikan dipaksa harus berhadapan dengan berbagai perubahan, baik di dalam maupun di luar lingkungan lembaga, dan dipaksa harus tanggap terhadap berbagai tantangan yang timbul, seperti menurunnya dukungan keuangan, pesatnya perkembangan teknologi, dan berubahnya struktur kependudukan, dan tertinggalnya program-program akademik.

1. Cui, Cui, R. Thurunamachandran, *Strategic Planning...*, 2000, hlm. 135.

2. Henry Mintzberg, *The Structuring of Organizations*, New York: Prentice-Hall, 1994, hlm. 179.

Sebagai dampak dari kondisi ini, sejumlah lembaga pendidikan menggunakan perencanaan strategis sebagai alat untuk meraih manfaat dan perubahan strategis untuk menyesuaikan diri dengan pesatnya perubahan lingkungan.³

A. Konsep Dasar Perencanaan Strategis

1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan pada masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan yang saksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian ini, prinsip perencanaan, yaitu: (a) hal yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi; (b) cara mencapai hal tersebut; (c) pihak yang akan melakukan; (d) lokasi aktivitas; (e) waktu pelaksanaan; (f) sumber daya yang dibutuhkan.

Sesuai dengan pendapat tersebut, Tjokroamidjojo⁴ mendefinisikan perencanaan sebagai cara mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber yang ada agar lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, dikatakan bahwa perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, cara, waktu, dan oleh pihak yang melaksanakannya. Robbins dan Coulter⁵ mendefinisikan perencanaan adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.

2. Makna dan Sifat Strategi/Strategis

a. Makna Strategi/Strategis

Strategi adalah cara yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber

3 D.J. Rowley, et. al., *Strategic Change in Colleges and Universities: Planning to Survive and Prosper*, San Francisco: Jossey-Bass, 1997, hlm. 221.
4 Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Masagung, 1992, hlm. 12.
5 Sule Erni Trisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 32.

daya yang dimiliki. Dengan demikian, perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Perencanaan strategis saat ini meliputi sejumlah pendekatan (yaitu paket konsep, prosedur, dan alat/metode) yang mempunyai ragam penerapannya dan keuntungannya untuk situasi yang berbeda.

b. Sifat-sifat Strategis

Secara singkat, perencanaan strategis mempunyai sifat-sifat:⁶

- 1) berorientasi lebih menuju ke tindakan, hasil, dan implementasi;
- 2) mempromosikan partisipasi yang lebih luas dan beragam dalam proses perencanaannya;
- 3) lebih menekankan pada pemahaman masyarakat terhadap konteks lingkungannya, mengidentifikasi peluang dan ancaman terhadap masyarakat melalui kajian lingkungan;
- 4) mengandung perilaku kompetitif (bersaing) di pihak masyarakat;
- 5) menekankan kajian kekuatan dan kelemahan masyarakat dalam konteks peluang dan ancaman.

Dari beberapa sifat rencana strategis tersebut perencanaan strategis berkaitan dengan perumusan arah pengembangan organisasi ke masa depan, untuk mencapai sasaran jangka panjang dan jangka pendek.

3. Esensi dan Pentingnya Perencanaan Strategis

a. Esensi Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis (*strategic plans*) merupakan proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan tersebut. Menurut Steiner, alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategis:⁷

- 1) perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;

6 M. Bryson, *Perencanaan Strategis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 3.

7 George A. Steiner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 1997, hlm. 29.

- 2) pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya.

Dengan adanya perencanaan strategis ini, konsepsi perusahaan menjadi jelas sehingga memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana lain dan dapat mengarahkan sumber organisasi secara efektif. Perencanaan strategi dapat menentukan keberhasilan organisasi atau perusahaan karena:

- 1) perencanaan strategi merupakan tipe perencanaan yang terpenting;
- 2) melakukan perencanaan strategi berarti menetapkan misi organisasi secara jelas;
- 3) perencanaan strategi memungkinkan manajer mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya perubahan pada lingkungan organisasinya.

b. Pentingnya Perencanaan Strategi

Strategi perencanaan adalah mekanisme yang memperjelas tujuan organisasi dan prioritas dalam pencapaian tujuan. Perencanaan yang baik memberikan kesempatan kepada pimpinan menentukan cara sumber daya yang terbatas itu digunakan untuk investasi. Pada umumnya perencanaan strategis terbatas pada analisis organisasi dan kekuatan serta kelemahan untuk perencanaan jangka menengah.

Perencanaan strategi harus dilaksanakan secara terpadu, yang akan mendorong organisasi untuk mengubah kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam Rencana Strategis menjadi langkah-langkah yang terukur dapat direalisasikan.

4. Asas, Keuntungan, dan Kerugian, Perencanaan dalam Organisasi serta Hasil Perencanaan Strategis

a. Asas Perencanaan Strategis dalam Organisasi

Asas-asas perencanaan dalam suatu organisasi merupakan pola nilai-nilai yang perlu dianut oleh tata laksana anggota organisasi. Nilai-nilai dalam sebuah organisasi merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar operasi dan pencarian organisasi tersebut dalam mencapai visi dan misinya. Nilai-nilai tersebut mengekspresikan kepercayaan dan cita-cita institusi.

Menurut Sallis, setiap institusi menentukan nilai-nilai yang sesuai dengannya. Beberapa hal yang tercantum dalam nilai-nilai sebuah organisasi, yaitu:⁸

- 1) bekerja dengan standar integritas profesional tertinggi;
- 2) bekerja sebagai tim;
- 3) memiliki komitmen terhadap peningkatan yang kontinu;
- 4) memberikan kesempatan yang sama pada semua;
- 5) memberikan mutu pelayanan yang tertinggi.

b. Keuntungan dan Kerugian Perencanaan Suatu Organisasi

Apabila perencanaan dilaksanakan dengan benar dan didukung oleh komitmen pemimpin, perencanaan dapat memberikan manfaat bagi organisasi, yaitu:

- 1) memperkuat "critical mass" menjadi tim yang kompak karena diarahkan untuk menganut nilai-nilai pokok, sistem utama, dan tujuan bersama. *Critical mass*, merupakan kelompok tenaga inti suatu organisasi yang memiliki motivasi, "aptitude" dan pengetahuan mendasar (*profound knowledge*) untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas organisasi;⁹
- 2) membantu untuk mengoptimisasikan "performance" organisasi. "Performance" organisasi meningkat apabila seluruh fungsi atau bagian organisasi bekerja sama secara serasi;
- 3) membantu pimpinan untuk selalu memusatkan perhatian dan menganut kerangka bagi perbaikan secara kontinu;
- 4) memberikan pedoman bagi pengambilan keputusan sehari-hari;
- 5) memberikan kemudahan dalam mengukur kemajuan organisasi, yaitu dalam usaha mencapai tujuannya untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas.

c. Kerugian Perencanaan dalam Suatu Organisasi

Persoalan yang sering timbul dalam kaitannya dengan proses perencanaan, antara lain:¹⁰

- 8 Edward Sallis, *Total Quality Manajemen In Education*, Jogjakarta: IAIN SoD, 2010, hlm. 218.
- 9 Soewarso Hardjosoodarmo, *Total Quality Manajemen*, Yogyakarta: Pustaka Andi, 2003, hlm. 76-78.
- 10 *Op. Cit.*, hlm. 82-83.

Demikian sebaliknya, bagi sekolah yang kekurangan potensi akan lebih lamban dalam mencapai SNP. Harapannya adalah semua sekolah tersebut dalam kurun waktu tertentu mencapai SNP yang ditentukan oleh pemerintah.

Standar Nasional Pendidikan yang harus dicapai oleh setiap sekolah meliputi standar kelulusan, kurikulum, proses, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian pendidikan. Sangat dimungkinkan suatu sekolah telah memenuhi standar kelulusan, tetapi fasilitasnya belum standar atau sebaliknya. Suatu sekolah sekarang kondisinya kurang dalam standar fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, buku, dan sebagainya dan secara bertahap akan dipenuhi selama kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, dipandang sangat penting adanya suatu pedoman pencapaian SNP yang mampu memberikan arah dan pegangan bagi setiap sekolah dalam rangka pencapaian SNP tersebut. Rencana Pengembangan Sekolah (RPPS/M) diharapkan menjadi salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, baik bagi sekolah rintisan, potensial, maupun nasional.

A. Konsep Dasar Rencana Pengembangan Program Sekolah/Madrasah

1. Pengertian Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah

Udin Syaefudin dkk. (2007) mengemukakan bahwa perencanaan itu dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹ Keputusan-keputusan itu disusun secara sistematis, rasional dan dapat dibenarkan secara ilmiah karena menerapkan berbagai pengetahuan yang diperlukan.

Perencanaan itu dapat pula diberi arti sebagai suatu proses pembuatan serangkaian kebijakan untuk mengendalikan masa depan sesuai yang telah ditentukan, kebijakan-kebijakan itu disusun dengan memperhitungkan kepentingan masyarakat dan kemampuan masyarakat.

1 Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Mahmud, *Perencanaan Pendidikan (Suatu Pendekatan Komprehensif)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 17.

Siswanto² mendefinisikan Rencana Pengembangan Program Sekolah/Madrasah (RPPS/M) sebagai sebuah dokumen perencanaan yang dibuat oleh "sekolah/madrasah" untuk mengadakan perubahan fisik dan nonfisik sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekolah/madrasah.

RPPS/M menggambarkan peta perjalanan perubahan sekolah/madrasah dari suatu kondisi sekarang menuju kondisi yang lebih baik dan lebih menjanjikan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Jadi, RPPS/M menggambarkan sekolah/madrasah sebagai suatu sistem dan bagian dari suatu sistem yang lebih luas yang berinteraksi secara berkesinambungan, memperoleh masukan dari masyarakat dan memberikan *output* kepada masyarakat sehingga mutu pelayanan sekolah/madrasah sangat bergantung pada *input* yang diterimanya dan proses yang dikerjakannya.

Oleh karena itu, jika pelayanan sekolah/madrasah ingin ditingkatkan, *input* dan proses dalam sekolah/madrasah itu harus disempurnakan.

2. Landasan Hukum Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

Rencana Pengembangan Sekolah dibuat berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku, yaitu:³

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2014-2019.

3. Tujuan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

Menurut Soetopo, tujuan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), yaitu:⁴

- menjamin agar perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil;

2 Siswanto, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 70.

3 HENDYAT Soetopo, *Perilaku Organisasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 342.

4 HENDYAT Soetopo, *Perilaku Organisasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 231.

- b. mendukung koordinasi antarpelaku sekolah;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antarsekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan antarwaktu;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- e. mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber-daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. sebagai dasar ketika melaksanakan monitoring dan evaluasi pada akhir program.

4. Pentingnya Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (RPPS/M)

Setiap sekolah/madrasah pada umumnya telah memiliki visi, misi, dan tujuan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah. Oleh karena itu, mutlak diperlukan adanya suatu pengembangan program sekolah/madrasah. Menurut Rohiat, (2012), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan perencanaan program bagi sekolah/madrasah potensial, yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Secara ideal, RPPS/M memiliki dua jenis, yaitu RPPS/M untuk jangka panjang (di atas lima tahun) dan untuk jangka menengah (lima tahun) yang disebut dengan rencana strategis dan RPPS/M jangka pendek (satu tahun) yang disebut rencana operasional.
- b. Prosedur pembuatan RPPS/M mengacu pada langkah-langkah yang digunakan dalam pembuatan RPPS/M. Demikian pula, dalam proses pembuatannya.
- c. Secara substansi, isi perencanaan program yang dikembangkan dalam RPPS/M disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah/madrasah masing-masing, tetapi tetap mengacu pada aspek-aspek SNP.

⁵ Rohiat, *Manajemen Sekolah (Praktik dan Dasar)*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 78.

B. Prinsip, Kriteria, dan Sistem Rencana Pengembangan Program Sekolah/Madrasah

1. Prinsip-prinsip Rencana Pengembangan Program Sekolah/Madrasah

Menurut Boediono, beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam rencana pengembangan program sekolah/madrasah, yaitu sebagai berikut:⁶

a. Mengacu pada Tujuan

Mengacu pada tujuan, artinya rencana pengembangan harus disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, untuk meningkatkan rata-rata NEM dari 5,5 menjadi 6,0, tujuan yang ingin dicapai sebaiknya dirumuskan secara spesifik sehingga dapat dijadikan pedoman penyusunan program dan mengukur ketercapaiannya.

b. Dapat Dilaksanakan

Dapat dilaksanakan, artinya dapat dilaksanakan dengan kondisi tenaga, sarana, dan dana yang ada atau dapat digali. Jadi, rencana pengembangan sekolah/madrasah harus realistis, sesuai dengan kondisi dan potensi setempat.

c. Komprehensif dan *Integrated*

Komprehensif dan *integrated*. Komprehensif artinya menyeluruh sebagai komponen yang saling terkait. Jika salah satu komponen diubah, komponen lain akan terpengaruh. Misalnya, jika untuk meningkatkan NEM, jam pelajaran ditambah, maka komponen guru, ruang kelas, anggaran dan daya tahan siswa akan terpengaruh. *Integrated* artinya terpadu. Setiap komponen atau bagian atau orang yang terkait harus dirancang dapat saling mendukung. Dalam contoh tersebut, komponen guru, anggaran, dan orang tua harus dirancang untuk saling mendukung peningkatan NEM siswa.

d. Efektif dan Efisien

Efektif artinya mencapai tujuan, sedangkan efisien artinya menggunakan tenaga, sarana, dan dana minimal. Agar efektif, rencana

⁶ Boediono, *Panduan Manajemen Sekolah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Utama, 1998, hlm. 48.

2	Pemindahan ruang wakil kepala sekolah ke ruang kepala sekolah SMP dan perluasan ruang TU	Perapihan ruang	✓							
3	Pemanfaatan ruangan kosong di Lt. IV	Pemanfaatan ruang	✓							
4	Semua guru memiliki buku pegangan dari beberapa percetakan	Pengadaan buku pegangan	✓		✓		✓		✓	
5	Memudahkan semua guru melaksanakan pembelajaran dengan tersedianya media belajar terutama untuk di laboratorium	Maksimalisasi laboratorium sebagai eksplorasi materi	✓		✓		✓		✓	
6	Reparasi perangkat komputer dan printer yang rusak	Seluruh komputer dan printer bermanfaat dalam menunjang kerja sekolah	✓		✓		✓		✓	
7	Penyediaan lemari untuk di kelas	Perapihan arsip administrasi pembelajaran	✓							
8	Toilet di selasar 1 selalu bersih	Toiletku bersih	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA PENDIDIKAN

BAB 9

Strategi pendidikan pada masa yang akan datang yang dipengaruhi perubahan kondisi lingkungan menuntut pimpinan lembaga pendidikan untuk mengembangkan program-program yang mampu menerjemahkan *current issues* dan mendukung rencana pendidikan masa depan. Keselarasan antara pendidikan dan perencanaan sumber daya manusia (SDM) dapat membangun perencanaan pendidikan yang pada akhirnya menentukan kebutuhan SDM.

Beberapa faktor eksternal yang memengaruhi aktivitas pendidikan dan perencanaan SDM, antara lain globalisasi, kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan komposisi angkatan kerja. Perubahan karakteristik angkatan kerja yang ditandai oleh berkurangnya tingkat pertumbuhan tenaga kerja, semakin meningkatnya masa kerja bagi golongan tua, dan peningkatan diversitas tenaga kerja membuktikan perlunya kebutuhan perencanaan SDM.

A. Konsep Dasar Rencana Pengembangan SDM Pendidikan

1. Batasan Pengertian Rencana Pengembangan SDM Pendidikan

Mondy dan Noe (1995) mendefinisikan perencanaan SDM sebagai proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia

untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat, akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Eric Vetter dalam Jackson dan Schuler mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia (*Human Resource Planning*) sebagai; proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan pada masa depan.¹

Dari beberapa pengertian tersebut, perencanaan SDM lembaga pendidikan adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan strategis yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja/pegawai pada masa yang akan datang dalam suatu lembaga pendidikan dengan menggunakan sumber informasi yang tepat guna penyediaan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas sesuai yang dibutuhkan lembaga pendidikan.

2. Tujuan dan Manfaat Pengembangan SDM Masa Depan

Tujuan utama perencanaan adalah memfasilitasi keefektifan lembaga pendidikan yang harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang organisasi.² Dengan demikian, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses menerjemahkan strategi pendidikan menjadi kebutuhan sumber daya manusia, baik kualitatif maupun kuantitatif melalui tahapan tertentu.

3. Strategi Perencanaan SDM

Sebuah lembaga pendidikan mewujudkan eksistensinya dalam rangka mencapai tujuan memerlukan perencanaan sumber daya manusia yang efektif.

Perencanaan tersebut memerlukan strategi yang di dalamnya terdapat seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia pada setiap level manajemen untuk menyelesaikan masalah organisasi guna meningkatkan kinerja organisasi saat ini dan masa depan serta menghasilkan keunggulan bersaing

1 S.E. Jackson and R.S. Schuler, *Human Resource Planning: Challenges for Industrial/Organization Psychologists*, New York: West Publishing Company, 1990, hlm. 211.

2 *Op. Cit.*, Jackson and Schuler, *Human Resource...*, 1990, hlm. 213.

berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah memastikan bahwa orang yang tepat berada pada tempat dan waktu yang tepat sehingga hal tersebut harus disesuaikan dengan rencana organisasi secara menyeluruh.

Untuk merancang dan mengembangkan perencanaan sumber daya manusia yang efektif menurut Manzini, ada tiga tipe perencanaan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan tunggal, yaitu:³ pertama, *strategic planning* yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan organisasi dalam lingkungan persaingan. Kedua, *operational planning*, yang menunjukkan *demand* terhadap SDM. Ketiga, *human resources planning*, yang digunakan untuk memprediksi kualitas dan kuantitas kebutuhan sumber daya manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang yang menggabungkan program pengembangan dan kebijaksanaan SDM.

Perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan strategik perlu diintegrasikan untuk memudahkan lembaga pendidikan melakukan berbagai tindakan yang diperlukan.

Perencanaan SDM dapat bermanfaat untuk:

- meningkatkan pendayagunaan SDM untuk memberikan kontribusi terbaik;
- menyelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi agar setiap pegawai/tenaga kerja dapat mengoptimalkan potensi dan keterampilannya untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- menghemat tenaga, biaya, dan waktu yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi untuk kesejahteraan pegawai/karyawan.

B. Implementasi Perencanaan Pengembangan SDM

1. Tahapan Perencanaan SDM

Menurut Jackson dan Schuler, perencanaan sumber daya manusia yang tepat membutuhkan langkah-langkah tertentu berkaitan dengan aktivitas perencanaan sumber daya manusia menuju organisasi modern, yaitu:⁴

3 Hadari Nawawi, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001, hlm. 77.

4 *Loc. Cit.*, Jackson and Schuler, *Human Resource...*, 1990, hlm. 341.

- mengumpulkan dan menganalisis data untuk meramalkan permintaan ataupun persediaan sumber daya manusia yang diekspektasikan bagi perencanaan bisnis masa depan;
- mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia;
- merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia;
- mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan.

Keempat tahap tersebut dapat diimplementasikan pada pencapaian tujuan jangka pendek (kurang dari satu tahun), menengah (dua sampai tiga tahun), ataupun jangka panjang (lebih dari tiga tahun). Rothwell menawarkan suatu teknik perencanaan sumber daya manusia yang meliputi tahap:⁵

- investigasi baik pada lingkungan eksternal, internal, maupun organisasional;
- forecasting atau peramalan atas ketersediaan *supply* dan *demand* sumber daya manusia saat ini dan masa depan;
- perencanaan bagi rekrutmen, pelatihan, promosi, dan lain-lain;
- utilasi, yang ditujukan bagi *manpower* dan kemudian memberikan *feedback* bagi proses awal.

2. Perencanaan SDM di Lembaga Pendidikan

Sumber daya manusia dan personalia merupakan elemen paling penting dalam setiap lembaga pendidikan karena merupakan penentu mati atau majunya sebuah lembaga pendidikan.

Permasalahan pemberdayaan sumber daya manusia dan personalia pendidikan terletak pada pemerataan pendidik dan tenaga pendidikan. Saat ini pendidik dan tenaga kependidikan lebih banyak tersebar di Pulau Jawa dan banyak yang tidak berkualitas, sedangkan di luar Jawa masih kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan.

Salah satu artikel Perencanaan SDM Pendidikan memberikan beberapa penawaran dan alternatif untuk mengurai permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut.

⁵ Lac. Cit., Rothwell, S., *Human Resource...*, 1995, hlm. 322

PERENCANAAN SDM PENDIDIKAN

Permasalahan	Perencanaan SDM	Alternatif Solusi
<ol style="list-style-type: none"> Banyaknya guru yang beredar di Pulau Jawa dan perkotaan dan mereka kekurangan jam mengajar sesuai amanat UU. Kemampuan daerah untuk pengadaan guru mengalami keterbatasan. Selama ini pemerintah kurang memperhatikan pengangkatan personalia pendidikan (pustakawan), sedangkan dia mempunyai fungsi untuk membantu kelancaran penerapan KTSP. 	Pemerataan	<ol style="list-style-type: none"> Penempatan guru di daerah terpencil dengan iming-iming kenaikan 2x gaji, perumahan, serta kenaikan pangkat. Pemerintah daerah perlu memaksimalkan pegawai selain guru untuk menjadi guru dengan pelatihan yang berkala. Alangkah baiknya pemerintah secara bertahap mengangkat dan menyebar pustakawan sampai kepada lembaga pendidikan daerah agar terjadi pemerataan dan membantu kelancaran penerapan KTSP, tentu dengan dilengkapi bukunya dan fasilitas dan ruang yang memadai.
<ol style="list-style-type: none"> Guru dalam penguasaan metode dan pengetahuan <i>out of date</i> dalam proses KBM. Pelatihan masih bersifat diskriminatif antara PNS dan non-PNS. Pelatihan hanya dijadikan untuk ajang <i>refresing</i> gratis uang saku, serta membekali sekolah karena guru meninggalkan tugas mengajar. Widyaiswara dengan persoalannya yang kompleks dari kurang perencanaan dalam bahan ajar, pengetahuan ketinggalan zaman, penguasaan materi yang rendah, metode yang tidak atraktif dan lain-lain. 	Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah mengadakan pelatihan kepada guru tentang metode pembelajaran yang baru. Peraturan yang mengatur hal tersebut perlu diubah dan memperhatikan perbedaan status kepegawaian yang ada. Pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator dengan memberikan kebebasan bagi guru untuk memilih materi dan tempatnya yang telah ditentukan pemerintah dengan memberikan dukungan penandaan dan fasilitas lainnya. Pemerintah dalam hal ini Balitbang Depag perlu mentraining serta memberikan beasiswa untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
<ol style="list-style-type: none"> Rekrutmen guru mengandalkan KKN, terutama pegawai honorer. tidak menggunakan analisis dan perencanaan akan kebutuhan guru. Sistem kepegawaian masih amburadul dan minat kaum muda menjadi guru rendah. 	Rekrutmen	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah lebih baik mengalokasikan pengangkatan guru muda profesional, yang dites dengan berlapis. Membandingkan rasio guru murid dan mengangkat berdasarkan kebutuhan. Menata ulang sistem penerimaan guru dengan mengangkat lulusan terbaik FIP secara langsung, menaikkan honorarium setara dengan

2. Kriteria penilaian

- Amat Baik (yang ditulis sangat relevan) diberi skor = 4
 - Baik (yang ditulis relevan) = 3
 - Cukup (yang ditulis kurang relevan) = 2
 - Kurang (yang ditulis sangat tidak relevan) = 1
- Jumlah skor 1 – 5 diberi nilai = D
6 – 10 diberi nilai = C
10 – 15 diberi nilai = B
16 – 20 diberi nilai = A

• Nilai Akhir = $\frac{\text{Total Nilai}}{5}$

Penilaian RPP

- Penulisan: (bobot 10)
Kerapian
- Kompetensi (Bobot 15)
 - (1) Penulisan standar kompetensi
 - (2) Penulisan kompetensi dasar
 - (3) Penulisan indikator
- Langkah-langkah kegiatan pembelajaran (bobot 50)
- Cara penilaian (bobot 25)

Kriteria penilaian:

1. 80–100 = A (lulus)
2. 70–79 = B (lulus)

RENCANA PENGEMBANGAN KURIKULUM

BAB 10

Kurikulum adalah semua pengalaman yang telah direncanakan untuk mempersiapkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan, baik yang diperoleh dari dalam maupun luar lembaga yang telah direncanakan secara sistematis dan terpadu.

Langkah awal membangun kurikulum dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik adalah perencanaan kurikulum. Pengembangan kurikulum mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program yang telah direncanakan dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri.

Perencanaan kurikulum dapat diartikan sebagai keahlian atau kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum. Pokok kegiatan utama studi manajemen kurikulum meliputi bidang perencanaan dan pengembangan kurikulum, pelaksanaan dan perbaikan kurikulum.

A. Konsep Dasar Perencana Pengembangan Kurikulum

1. Pengertian Peranan dan Pengembangan Kurikulum

Menurut Sudjana,¹ perencanaan secara umum adalah proses yang sistematis sesuai dengan prinsip dalam pengambilan keputusan, penggunaan pengetahuan dan teknik secara ilmiah serta kegiatan yang terorganisasi tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Waterson dalam Sudjana (2000) menyebutkan bahwa perencanaan pada hakikatnya merupakan usaha sadar, terorganisasi, dan terus-menerus yang dilakukan untuk memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif tindakan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu.

Oemar Hamalik menyatakan bahwa perencanaan kurikulum adalah kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga terjadi perubahan-perubahan pada peserta didik.²

Perencanaan kurikulum (*curriculum improvement, curriculum building*) adalah kegiatan yang mengacu pada usaha untuk melaksanakan dan menyempurnakan kurikulum yang telah ada, untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal.

Pengembangan kurikulum (*curriculum development, curriculum planning* atau *curriculum design*), sebagai tahap lanjutan dari pembinaan, yakni kegiatan yang mengacu untuk menghasilkan suatu kurikulum baru. Dalam kegiatan tersebut meliputi penyusunan-penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan. Melalui tahap-tahap tersebut akan dihasilkan kurikulum dan dengan terbentuknya kurikulum baru itu maka tugas pengembangan telah selesai, kemudian tugas berikutnya beralih pada kegiatan pembinaan kurikulum.

Menurut Syarief, pengembangan kurikulum, intinya adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan yang diinginkan dan menilai perubahan yang telah terjadi pada diri siswa.³

1 Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 33.

2 Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 12.

3 Hamsid Syarief, *Pengembangan Kurikulum*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993, hlm. 48.

Nana Syaodih (1997:3) menyebutkan bahwa kedudukan kurikulum dalam pengajaran sangat penting karena kurikulum merupakan pedoman untuk tercapainya tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Dalam kurikulum terdapat komponen-komponen kurikulum yang harus dikuasai oleh pengajar, antara lain tujuan, bahan ajar, alat, metode, dan penilaian.

Menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa. Anggapan demikian kini tidak berlaku lagi seiring dengan terus diadakannya pembaharuan dan pengembangan kurikulum. Kurikulum yang berkembang sekarang adalah kurikulum yang telah beralih dari menekankan pada isi menjadi lebih menekankan pada pengalaman belajar.

Konsep pengembangan kurikulum saat ini yang lebih penting adalah konsep pengembangan tentang kurikulum sebagai substansi, subjek, dan bidang studi. Sebagai substansi kurikulum merupakan suatu rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai suatu perangkat dengan tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum sebagai sistem adalah bahwa kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat.

2. Asas-asas Perencanaan Kurikulum

Menurut Hamalik, perencanaan kurikulum disusun berdasarkan asas-asas berikut.⁴

a. Objektivitas

Perencanaan kurikulum memiliki tujuan yang jelas dan spesifik berdasarkan tujuan pendidikan nasional, data *input* yang nyata sesuai dengan kebutuhan.

b. Keterpaduan

Perencanaan kurikulum memadukan jenis dan sumber dari semua disiplin ilmu, keterpaduan sekolah dan masyarakat, keterpaduan internal, serta keterpaduan dalam proses penyampaian.

4 *Loc. Cit.*, Oemar Hamalik, *Manajemen.....*, 2006, hlm. 155.

informasi kebijakan yang relevan antara seni kepemimpinan dan pengetahuan yang telah dimiliki.

- c. Motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil optimal.

B. Manajemen Perencanaan Pengembangan Kurikulum

1. Esensi Manajemen Perencanaan Kurikulum

Dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Menurut Nasution, kurikulum dipandang sebagai rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Sejumlah ahli teori kurikulum berpendapat bahwa kurikulum bukan hanya meliputi semua kegiatan yang direncanakan, melainkan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah pengawasan sekolah.⁷

Kurikulum sangat penting dalam dunia pendidikan maka kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang harus dicapai serta pengalaman belajar yang harus didapatkan oleh para peserta didik. Dengan demikian, dalam merumuskan kurikulum harus memperhatikan beberapa faktor penting, misalnya faktor perkembangan dan psikologi peserta didik, lingkungan sekitar, serta teknologi di tiap-tiap jenjang pendidikan.

Menurut Hikmat (2009), ada tiga keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer lembaga pendidikan yang menyusun kurikulum, yakni keterampilan konseptual, keterampilan manusiawi, dan keterampilan teknis.⁸ Dari ketiga keterampilan tersebut, keterampilan konseptual yang paling dibutuhkan dalam merencanakan kurikulum.

Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Demikian pula, manajemen dalam perencanaan kurikulum dapat diartikan sebagai keahlian atau kemampuan merencanakan dan mengorganisasi kurikulum. Siapa

⁷ Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, Cet. VI, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 5.

⁸ *Op. Cit.*, hlm. 47.

yang bertanggung jawab dan bagaimana perencanaan kurikulum itu dilaksanakan secara profesional merupakan dua hal yang perlu diungkapkan dalam perencanaan kurikulum, yaitu sebagai berikut.

a. Organisasi Kurikulum

Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid. Organisasi kurikulum ini berkaitan erat dengan pencapaian tujuan pendidikan karena kurikulum memuat aturan-aturan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Suryosubroto pola pengorganisasian kurikulum ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.⁹

- 1) *Separated subject curriculum*, menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran (*subjects*) yang terpisah-pisah satu sama lain, seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, juga antara suatu kelas dengan kelas lain.
- 2) *Correlated curriculum*, menghendaki agar mata pelajaran memiliki hubungan bersangkut paut (*correlated*) walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lain, masih dipertahankan.
- 3) *Integrated curriculum*, meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan.

b. Model Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum merupakan kegiatan kompleks berkaitan dengan pengambilan keputusan. Adapun model-model dalam perencanaan kurikulum yang disebutkan oleh Oemar Hamalik adalah sebagai berikut.¹⁰

- 1) Model perencanaan rasional deduktif atau rasional Tyler, menitikberatkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan (*goals and objectives*). Model ini cenderung mengabaikan masalah dalam lingkungan tugas. Model ini dapat diterapkan pada semua tingkat pembuatan keputusan, tetapi lebih

⁹ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 33.

¹⁰ *Loc. Cit.*, Oemar Hamalik, *Manajemen.....*, 2006, hlm. 153-154.

berasal dari kata *rencana*, yaitu pengambilan keputusan tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, proses suatu perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.¹

Pada prinsipnya rencana adalah dokumen dari hasil kegiatan. Terry mengungkapkan bahwa perencanaan pada dasarnya adalah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.²

Setiap perencanaan minimal harus memiliki empat unsur:

- a. tujuan yang harus dicapai;
- b. strategi untuk mencapai tujuan;
- c. sumber daya yang dapat mendukung;
- d. implementasi setiap keputusan.

Adapun pembelajaran menurut Wina Sanjaya, adalah proses kerja sama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang bersumber dari dalam diri (seperti minat, bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar) maupun potensi yang ada di luar diri siswa (seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar) sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu.³

Sebagai sebuah proses kerja sama, pembelajaran tidak hanya menitik-beratkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa, tetapi guru dan siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.

2. Fungsi Rencana Pembelajaran

Menurut Wina Sanjaya, ada dua fungsi rencana pembelajaran, yaitu sebagai berikut.⁴

1 Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 24.
2 *Loc. Cit.*, Wina Sanjaya, *Perencanaan* ..., 2009, hlm. 4.
3 *Loc. Cit.*, Wina Sanjaya, *Perencanaan* ..., 2009, hlm. 26.
4 *Op. Cit.*, hlm. 33.

a. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan dalam konteks persiapan pembelajaran adalah bahwa rencana pembelajaran harus mendorong guru lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, setiap akan melakukan pembelajaran, guru wajib memiliki persiapan, baik persiapan tertulis maupun tidak tertulis. Komponen-komponen yang harus diperhatikan dan dipahami guru dalam menyiapkan rencana pembelajaran ini, antara lain kompetensi dasar, materi standar, hasil belajar, dan indikator hasil belajar. Selain itu, Evaluasi berbasis kelas (EBK), ujian berbasis sekolah atau *school based exam* (SBE), dan prosedur pembelajaran.

b. Fungsi Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana pembelajaran hendaknya disusun secara sistemik dan sistematis, utuh dan menyeluruh, dengan beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang aktual. Dengan demikian, rencana pembelajaran dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengefektifkan proses pembelajaran dengan hal-hal yang telah direncanakan. Dalam konteks ini materi standar yang dikembangkan dan dijadikan bahan kajian oleh siswa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya, mengandung nilai fungsional, praktis serta disesuaikan panduan pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan, sekolah, dan daerah. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran harus terorganisasi melalui serangkaian kegiatan tertentu, dengan strategi yang tepat.

3. Prinsip Pengembangan Rencana Pembelajaran

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan persiapan pembelajaran, antara lain sebagai berikut.⁵

- a. Kompetensi yang dirumuskan dalam persiapan pembelajaran harus jelas. Semakin konkret perumusan kompetensi yang akan dicapai dalam proses pembelajaran, semakin mudah diamati, dan semakin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut.
- b. Rencana pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi siswa.

5 Depag, *Sistem Pembelajaran*, Bandung: Aditama, 2006, hlm. 30.

Menurut Hunt (1999), yang dikutip oleh Majid (2005), unsur-unsur perencanaan pembelajaran tersebut adalah mengidentifikasi kebutuhan siswa, tujuan yang hendak dicapai, berbagai strategi dan skenario yang relevan digunakan untuk mencapai tujuan, dan kriteria evaluasi.⁸

Menurut Majid (2005), untuk membuat persiapan mengajar yang efektif dan berhasil guna, guru dituntut untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan persiapan mengajar, baik berkaitan dengan hakikat, fungsi, prinsip maupun prosedur pengembangan persiapan mengajar, serta mengukur efektivitas mengajar.⁹

Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa rencana pembelajaran yang baik menurut Gagne dan Briggs (1974) dalam Majid (2005), harus tiga komponen yang disebut *anchor point*, yaitu: (1) tujuan pengajaran; (2) materi pelajaran, bahan ajar, pendekatan dan metode mengajar, media pengajaran dan pengalaman belajar; (3) evaluasi keberhasilan.¹⁰

Hal ini sesuai dengan pendapat Moore (2001), bahwa komposisi format rencana pembelajaran meliputi komponen topik bahasan, tujuan pembelajaran (kompetensi dan indikator kompetensi), materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, alat/media yang dibutuhkan, dan evaluasi hasil belajar.¹¹

Suryadi dan Mulyana mengemukakan, unsur-unsur utama yang harus ada dalam perencanaan pengajaran, yaitu:¹²

- a. tujuan yang hendak dicapai, berupa bentuk-bentuk tingkah laku apa yang diinginkan untuk dimiliki siswa setelah terjadinya proses belajar mengajar;
- b. bahan pelajaran atau isi pelajaran yang dapat mengantarkan siswa mencapai tujuan;
- c. metode dan teknik yang digunakan, yaitu cara proses belajar mengajar yang akan diciptakan guru agar siswa mencapai tujuan;

8 Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 94.

9 *Lac. Cit.*, Abdul Majid, *Perencanaan.....*, 2005, hlm. 95.

10 Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 96.

11 Keraneth, D. Moore, *Classroom Teaching Skill*, New York: McGraw Hill, 2001, hlm. 126.

12 Ace Suryadi dan Wiana Mulyana, *Kemangka Konseptual Mata Pendidikan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Guru*, Jakarta: Cardinas Metropole, 1993, hlm. 21.

- d. penilaian, yaitu cara menciptakan dan menggunakan alat untuk mengetahui tujuan tercapai atau tidak.

C. Langkah-langkah Menyusun Rencana Pembelajaran

Proses belajar mengajar perlu direncanakan agar dalam pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan baik dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Perencanaan program belajar mengajar memperkirakan mengenai tindakan yang akan dilakukan pada waktu melaksanakan pembelajaran. Untuk membuat perencanaan pembelajaran yang baik dan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang ideal, setiap guru harus mengetahui unsur-unsur perencanaan pembelajaran yang baik.

Menurut Rosyada, (2004), ada empat langkah dalam melakukan rencana pembelajaran yaitu:¹³

- a. perencanaan untuk mengapresiasi keragaman;
- b. merumuskan tujuan dan kompetensi;
- c. menyusun rencana implementasi pembelajaran dalam kelas;
- d. menentukan model penilaian (evaluasi).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang sangat penting masuk dalam rencana pengajaran adalah sebagai berikut.

- a. Apa yang akan diajarkan? Pertanyaan ini menyangkut berbagai kompetensi yang harus dicapai, indikator-indikatornya, serta materi bahan ajar yang akan disampaikan untuk mencapai kompetensi tersebut.
- b. Bagaimana mengajarkannya? Pertanyaan ini berkenaan dengan berbagai strategi yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran, termasuk pengembangan berbagai aktivitas opsional bagi siswa dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
- c. Bagaimana mengevaluasi hasil belajarnya? Pertanyaan ini harus dijawab dengan merancang jenis evaluasi untuk mengukur daya serap siswa terhadap materi yang mereka pelajari pada sesi tersebut.

13 *Lac. Cit.*, Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan.....*, 2004, hlm. 123.

Jadi, delapan bilangan bulat yang lebih dari -3 adalah: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5.

3. Dik: a. $(-76) + 48 = n$ b. $(-89) + (-23) = n$
c. $(-64) - (-37) = n$ d. $55 - (-91) = n$

Dit: Tentukanlah nilai n dari operasi penjumlahan dan pengurangan tersebut tanpa menggunakan garis bilangan?

Penyelesaian:

a. $(-76) + 48 = n$

$$(-76) + 48 = -28$$

Maka nilai n untuk operasi penjumlahan di atas adalah -28.

b. $(-89) + (-23) = n$

$$(-89) + (-23) = -112$$

Maka nilai n untuk operasi penjumlahan di atas adalah -112.

c. $(-64) - (-37) = n$

$$(-64) + 37 = -27$$

Maka nilai n untuk operasi pengurangan di atas adalah -27.

d. $55 - (-91) = n$

$$55 + 91 = 146$$

Maka nilai n untuk operasi pengurangan di atas adalah 146.

4. a. Dik: (i) $(9 + (-21)) + 6 =$ dan (ii) $9 + (-21 + 6) =$

Dit: Hitunglah masing-masing operasi penjumlahan bilangan bulat tersebut!

Bandingkan kedua hasil penjumlahan bilangan bulat tersebut!

Sifat apakah yang berlaku dari hasil kedua operasi penjumlahan bilangan bulat tersebut?

Penyelesaian:

(i) $(9 + (-21)) + 6 = -12 + 6$

$$= -6$$

(ii) $9 + (-21 + 6) = 9 - 15$

$$= -6$$

Kedua penjumlahan tersebut memiliki jawaban yang sama sehingga berlaku sifat asosiatif pada penjumlahan bilangan bulat.

RENCANA ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN

BAB 12

Biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya.

Pembiayaan pendidikan yang bersifat *budgetair*, yaitu biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga. Artinya, biaya-biaya pendidikan yang bersifat *budgetair* dan *nonbudgetair* termasuk dalam pengertian biaya pendidikan dalam arti luas. Adapun pengertian biaya pendidikan yang bersifat *nonbudgetair*, yaitu biaya-biaya pendidikan yang dibelanjakan oleh peserta didik, atau orang tua/keluarga dan biaya kesempatan pendidikan.¹

A. Konsep Dasar Rencana Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan

1. Pembiayaan Pendidikan

Menurut N. Fattah, anggaran biaya pendidikan terdiri atas dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan.²

¹ N. Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 23.

² *Ibid.*

Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur dalam setiap tahun. Untuk sekolah dasar negeri, sumber anggaran penerimaan terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua murid, dan sumber lain. Adapun anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah.³

Berdasarkan pendekatan unsur biaya, pengeluaran sekolah dapat dikategorikan dalam beberapa item pengeluaran, yaitu:

- a. pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran;
- b. pengeluaran untuk tata usaha sekolah;
- c. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- d. kesejahteraan pegawai;
- e. administrasi;
- f. pembinaan teknis *education*;
- g. pendataan.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Adapun biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Konsep Pembiayaan Pendidikan

Berkenaan dengan konsep pembiayaan pendidikan dasar, ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan biaya pendidikan di sekolah yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Adapun biaya satuan/per siswa merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar

3 Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kowfempover*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 137.

uang yang dialokasikan ke sekolah secara efektif untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan.

Konsep dasar pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut.

1. Konsep Penganggaran

Dalam kegiatan umum keuangan, kegiatan pendidikan meliputi tiga hal berikut.

- a. *Budgeting* (penyusunan anggaran). Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*). *Budget* merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Penyusunan anggaran di sekolah melibatkan pimpinan sekolah. Pada dasarnya penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan/kesepakatan antara pihak sekolah beserta staf atau pemimpin lembaga pendidikan dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran.
- b. *Accounting* (pembukuan) menyangkut kewenangan: (1) menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang; (2) menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang.
- c. *Auditing* (pemeriksaan) adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berwenang.

2. Hal-hal yang Berpengaruh terhadap Pembiayaan Pendidikan

Secara garis besar, pembiayaan pendidikan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

a. Faktor eksternal

Faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar sistem pendidikan yang meliputi hal berikut.

- 1) Berkembangnya demokrasi pendidikan. Di Indonesia Demostrasi Pendidikan dirumuskan dengan jelas dalam Pasal 31 UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2). Konsekuensi dari adanya demokrasi itu maka pemerintah menyediakan dana yang cukup untuk itu.

b. Mempersiapkan anggaran

Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia.

c. Mengelola perencanaan anggaran

Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah (RAPBS/M), harus melibatkan beberapa unsur, di antaranya:

- 1) kepala sekolah/madrasah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah/madrasah;
- 2) orang tua murid dalam wadah Komite Sekolah;
- 3) dinas Pendidikan Kota/Kabupaten;
- 4) pemerintah kota/kabupaten setempat.

Semua komponen ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan operasional sekolah sesuai kedudukan dan kapasitasnya.

d. Menilai perencanaan RAPBS/M

Menilai perencanaan anggaran, yaitu menilai pelaksanaan program belajar mengajar, menilai cara mencapai sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.

Untuk melengkapi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M), berikut ini disajikan model format gabungan antara RAPBS/dengan Rencana Kegiatan, yang sejak tahun anggaran 2017/2018. Istilahnya menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M), di dalamnya terdapat RAPBS/M sebagai berikut.

Contoh: Model RKAS/M

**RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH/MADRASAH (RKAS/M)
TAHUN AJARAN: 2017/2018**

Nama Sekolah : NAMA SEKOLAH/MADRASAH
 Alamat : Jl.
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi : Jawa Barat

A. PINGGUNAAN

No. Urut	No. Kode	Uraian	SUMBER DANA									
			BOS PUSAT					BOS PROVINSI				
			Jumlah	Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	Jumlah	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)	9.356.000									
	1 1	Kompetensi Lulusan										
	1 1 1	Penyusunan KKM										
	5 2 2 01 01	ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)	500.000	500.000				500.000		500.000		500.000
	5 2 2 11 02	Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (pantin 9 orang x 192 orang)	200.000	200.000				200.000		200.000		200.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4		PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.200,000									
	4 1	Peningkatan Kompetensi Pendidik										
	4 1 2	Pembinaan Guru di Gugus										
	4 1 2 1	Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran										
	5 2 1 05 03	Belanja Hibing-an Teknis KKG 10 x 12 x 10.000	1.200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1.200,000
		Subtotal per Triwulan		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000		
5		PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	13.900,000									
	5 1	Barang-an gedung										
	5 1 1	Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC	2.000,000									
	5 2 1 02 04	Upah/ongkos tenaga										
	5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	3.000,000									
	5 2 2	Pengadaan Meubelair										
	5 2 3 13 10	Belanja modal pengadaan meja kursi siswa 10 stel	2.300,000									
	5 2 3	Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah										
	5 2 3 1	Biaya Pemeliharaan Jaringan Internet Kantor										
	5 2 3 18 01	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	2.000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2.000,000

RENCANA PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

BAB 13

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas disebutkan bahwa Standar Pendidikan Nasional meliputi kategori standardisasi yang terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian yang harus ditingkatkan secara terencana dan berkala.

Khusus mengenai standar perencanaan sarana prasarana menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan barang atau jasa, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, semua itu harus diatur agar bisa difungsikan dan ditempatkan sesuai dengan fungsinya. Fungsi manajemen sarana prasarana ini dimulai dari perencanaan mengenai sarana prasarana yang dibutuhkan dengan menganalisis dan mengkaji hal-hal penting yang dibutuhkan suatu sekolah.

Pengadaan sarana prasarana pendidikan ialah semua kegiatan atau usaha untuk menyediakan semua sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setelah data mengenai sarana prasarana ini dianalisis sesuai dengan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh satuan pendidikan serta aturan yang berlaku, sarana prasarana itu diajukan dan diadakan untuk satuan pendidikan.

A. Konsep Dasar Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan

1. Pengertian Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Menurut Bafford dan Bedeian, perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pemilihan tindakan masa depan untuk mencapai tujuan tersebut.¹ Adapun menurut Bafadal (2014), perencanaan adalah proses pemikiran dan penetapan kegiatan atau program yang dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu.²

Roger A. Kauffman seperti yang dikutip oleh Nanang Fattah menyatakan bahwa perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Dengan demikian, perencanaan adalah proses kegiatan menentukan tindakan pada masa ke depan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.³

Pengertian sarana dan prasarana menurut Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Adapun prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.

Proses perencanaan ini merupakan proses yang sangat penting dalam pengadaan sarana dan prasarana agar pengadaan bisa efektif dan efisien sesuai dengan tujuan. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah tidaklah mudah. Perencanaan perlengkapan pendidikan harus memikirkan perlengkapan yang diperlukan pada masa yang akan datang dan bagaimana pengadaannya secara sistematis, terperinci, dan teliti berdasarkan informasi dan realistik tentang kondisi sekolah. Apabila pengadaan sarana dan prasarana telah sesuai dengan kebutuhan, perencanaan pengadaan dapat dikatakan efektif.

- 1 A. Soehadji dan M. Huda, *Asesmen Kebutuhan, Pengambilan Keputusan, dan Perencanaan*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2014, hlm. 21.
- 2 Syaiful Sagala, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Ninas Multima, 2004, hlm. 26.
- 3 Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996, hlm. 22.

Agar hal tersebut dapat dicapai semua pihak yang dilibatkan atau ditunjuk sebagai panitia perencanaan pengadaan perlengkapan sekolah, harus mengetahui dan mempertimbangkan program pendidikan, perlengkapan yang sudah dimiliki, dana yang tersedia, dan harga pasar.

2. Karakteristik Perencanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah

Karakteristik esensial perencanaan pengadaan perlengkapan sekolah menurut Bafadal (2014), yaitu sebagai berikut.⁴

- a. Proses menetapkan dan memikirkan.
- b. Objek pikir dalam perencanaan perlengkapan sekolah adalah upaya memenuhi sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan sekolah.
- c. Tujuan perencanaan perlengkapan sekolah adalah efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan perlengkapan sekolah.
- d. Perencanaan perlengkapan sekolah harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 1) merupakan proses intelektual;
 - 2) didasarkan pada analisis kebutuhan melalui studi komprehensif mengenai masyarakat sekolah dan kemungkinan pertumbuhannya, serta prediksi populasi sekolah;
 - 3) realistik, sesuai dengan kenyataan anggaran;
 - 4) visualisasi hasil perencanaan perlengkapan sekolah harus jelas dan terperinci, baik jumlah, jenis, merek, maupun harganya.

3. Prinsip Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, menurut Bafadal (2014), yaitu sebagai berikut.⁵

a. Pencapaian tujuan

Pada dasarnya perencanaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Oleh sebab itu, perencanaan perlengkapan sekolah dapat dikatakan berhasil apabila fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat, pada setiap seorang personel sekolah akan menggunakannya.

⁴ *Loc. Cit.*, Syaiful Sagala, *Manajemen*....., 2004, hlm. 27.

⁵ *Op. Cit.*, Syaiful Sagala, *Manajemen*....., 2004, hlm. 31.

2. Usul Kebutuhan Perlengkapan

Usul kebutuhan perlengkapan adalah kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh satuan kerja untuk merumuskan kebutuhan perlengkapan yang berdasarkan dan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- usul disesuaikan dengan rencana kegiatan tiap-tiap satuan organisasi yang akan menggunakan barang tersebut;
- usul disesuaikan dengan jumlah dan kondisi kepegawaian yang ada;
- usul disesuaikan dengan memperhatikan barang-barang yang masih ada dan yang masih dapat dipergunakan.

Sebelum melakukan suatu usulan kebutuhan perlengkapan, kelompok satuan kerja harus mengetahui dengan tepat keadaan kantor, keadaan lingkungan, perlengkapan yang ada, perlengkapan yang diperlukan, cara pengguna dan pemeliharaan alat-alat yang ada untuk menunjang kegiatan tugas pokok.

Usul kebutuhan perlengkapan menurut macam dan jenis barang, yaitu sebagai berikut.

Pengelompokan barang

Sekolah membuat usulan rencana kebutuhan perlengkapan menurut macam dan jenis barang, yaitu:

- komputer;
- tanah persil untuk bangunan, lapangan olahraga, pertamanan, dan sebagainya;
- bangunan bukan tempat tinggal, seperti sekolah, perguruan tinggi, bengkel, kantor, gudang, dan sebagainya;
- bangunan tempat tinggal, seperti rumah jabatan, rumah dinas, rumah istirahat, asrama, dan sebagainya;
- peralatan pengangkutan/mobilitas, seperti kendaraan;
- peralatan rumah tangga, seperti peralatan dapur, peralatan untuk makan, dan sebagainya;
- buku perpustakaan, jenis filsafat, agama, IPA, IPS, bahasa, dan sebagainya;
- barang-barang persediaan.

RENCANA PENGEMBANGAN KERJA SAMA KEMITRAAN PENDIDIKAN

BAB 14

Setiap program yang ada di sekolah perlu dikembangkan, terutama program hubungan sekolah dengan masyarakat yang masih dini dalam masyarakat perlu mendapat perhatian terus untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan keikutsertaannya dalam bertanggung jawab terhadap pendidikan di sekolah belum tinggi. Sekalipun kesadaran pentingnya pendidikan sudah tinggi. Mereka tidak banyak berpartisipasi di sekolah. Selain itu, karena kondisi sosial ekonominya, mereka hanya terpaku pada usaha-usaha meningkatkan kehidupan dan beranggapan bahwa pendidikan di sekolah cukup ditangani oleh personalia-personalia sekolah saja. Apa pun alasannya yang membuat partisipasi masyarakat dalam pendidikan di sekolah belum banyak, perlu diteliti dan dikaji oleh sekolah dijadikan bahan untuk mengembangkan hubungan sekolah dengan masyarakat.

Kerja sama kemitraan sekolah dengan masyarakat merupakan salah satu bidang garapan manajemen pendidikan. Kemitraan ini melibatkan orang tua, dan masyarakat serta isu-isu yang timbul dan cara menyelesaikan isu-isu tersebut. Dalam membangun hubungan ini, kepemimpinan kepala sekolah mempunyai peranan penting, yaitu menghimpun dan menggerakkan segala sumber daya di dalam kerja sama dengan masyarakat pendidikan yang lebih luas, dan memperoleh berbagai dukungan sumber daya manusia, dana, serta dukungan informasi berbagai lembaga dan dukungan politis dari segenap jajaran aparat pendidikan.

Pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat, pendidikan harus dititikberatkan untuk menciptakan pendidikan yang bermutu, baik dari segi konteks, masukan, keluaran, dan dampaknya. Pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat yang bermutu memerlukan perencanaan yang akurat, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, kepala sekolah harus merumuskan satu rencana dan strategi baru dalam membangun dunia pendidikan.

A. Konsep Dasar Perencanaan Program Hubungan Kemitraan

1. Pengertian Hubungan Kemitraan

Jika dilihat dari sisi maknanya, hubungan kemitraan sekolah dan masyarakat memiliki pengertian yang sangat luas sehingga para ahli memiliki persepsi yang berbeda-beda.

Secara lebih umum, dikatakan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat diartikan sebagai proses komunikasi dengan tujuan meningkatkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan praktik pendidikan serta berupaya dalam memperbaiki sekolah.¹ "Hubungan masyarakat dengan sekolah merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja sama serta pemenuhan kepentingan bersama" (*international public relation association*).

2. Program Kerja Kehumasan yang Ada di Sekolah

Program kerja adalah suatu rencana kegiatan dan suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi termasuk lembaga pendidikan.

Menurut Minarti, salah satu tujuan program kehumasan adalah memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga:

1. Hendyat Soetopo, Wasty Soemanto, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1982, hlm. 236.

lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi sosial.² Salah satunya adalah dengan dunia usaha dan dunia industri.

3. Tujuan Program Hubungan Kemitraan

Secara umum hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan meningkatkan mutu pendidikan sehingga masyarakat akan merasakan dampak langsung dari kemajuan tersebut. Tujuan yang lebih konkret hubungan sekolah dan masyarakat, antara lain:

- meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik;
- memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan saat ini;
- mengembangkan program sekolah ke arah yang lebih maju dan lebih membumi agar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan.

Untuk membantu pemahaman tentang makna dari hubungan sekolah dan masyarakat, Oteng Sutisna mengungkapkan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat memiliki tujuan:³

- mengembangkan pemahaman tentang maksud dan saran-saran dari sekolah;
- menilai program sekolah dengan kata-kata kebutuhan terpenuhi;
- mempersatukan orang tua, murid, dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik;
- mengembangkan kesadaran akan pentingnya pendidikan sekolah pada era pembangunan;
- membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah;
- memberi tahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah;
- mengerahkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah.

Adapun peran serta fungsi sekolah dalam mengembangkan hubungannya dengan masyarakat, antara lain merumuskan saluran komunikasi yang dapat dipergunakan oleh sekolah ataupun masyarakat.

2. Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, hlm. 285.

3. Oteng Sutisna, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: Jamaras, 1979, hlm. 34.

Format draf RAPK terdiri atas:

- 1) latar belakang;
- 2) rumusan tujuan kemitraan;
- 3) program dan kegiatan, pada Tabel 14.1 berikut:

Tabel: 14.1
Format Rencana Aksi Program Kemitraan (RAPK)

No.	Program dan Kegiatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Kegiatan	Penanggung Jawab	Ket.

Sumber: Nadang Hidayat dkk. (2016)

3. Tahapan Pengorganisasian

Pengorganisasian program kemitraan diawali dengan kegiatan yang dikemas secara informal agar orang tua/wali dan masyarakat merasa nyaman dan tergerak untuk berpartisipasi secara aktif. Pengorganisasian program kemitraan adalah proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan program kemitraan, menempatkan orang-orang pada setiap kegiatan, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan kegiatan tersebut.

4. Tahapan Pelaksanaan Program Kemitraan

a. Pengembangan Kapasitas Warga Sekolah

Pengembangan kapasitas warga sekolah dapat dilakukan dengan berbagai langkah berikut:

- 1) diskusi tentang hakikat kemitraan pendidikan yang melibatkan narasumber ahli;
- 2) pelibatan semua komponen warga sekolah dalam penyusunan RAPK;
- 3) sosialisasi tentang kemitraan di lingkungan warga sekolah.

b. Pertemuan Wali Kelas dengan Orang Tua/Wali

Pertemuan wali kelas dengan orang tua/wali, sekolah dapat menyusun jadwal pertemuan dengan orang tua/wali terutama pada momen tertentu seperti digambarkan sebagai berikut.



Gambar 14.1

Jadwal Pertemuan dengan Orang Tua/Wali
Sumber: diadaptasi dari Nadang Hidayat dkk. (2016)

Tahapan pertemuan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. Pertemuan Pertama

Hari pertama masuk sekolah merupakan waktu yang sangat penting untuk menjalin kemitraan sekolah dengan seluruh orang tua/wali peserta didik. Pihak sekolah diwakili wali kelas melakukan pertemuan ini dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) menyediakan daftar hadir orang tua/wali, data orang tua/wali, dan agenda pertemuan (Tabel 14.2, 14.3, dan 14.4);
- 2) memperkenalkan diri yang mencakup nama, alamat, dan nomor telepon seluler (jika ada);
- 3) menginformasikan nama kepala sekolah dan ketua komite sekolah serta nomor teleponnya;
- 4) menjelaskan aturan sekolah serta hak dan kewajiban orang tua/wali;
- 5) menjelaskan aturan sekolah serta hak dan kewajiban orang tua/wali;
- 6) menyampaikan harapan sekolah kepada orang tua/wali dalam mendukung kegiatan belajar anak di rumah dan di sekolah;

4. Daftar Isi

Memuat semua hal (item) yang ada dalam Program Kerja sama dan Kemitraan Sekolah yang disusun dilengkapi dengan halaman.

5. Batang Tubuh

a. Pendahuluan

Pendahuluan memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) kondisi ideal suatu sekolah sesuai dengan harapan sekolah;
- 2) kondisi riil sekolah pada saat sebelum disusunnya kerja sama dan kemitraan;
- 3) upaya atau langkah memenuhi kondisi ideal sekolah.

b. Dasar Kebijakan

Bagian ini memuat landasan perumusan, antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 3) Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

c. Tujuan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun tujuan, antara lain:

- 1) program yang disusun harus mengacu pada tujuan sekolah;
- 2) memperhatikan skala prioritas terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam kerjasama dan kemitraan;
- 3) tujuan yang disusun hendaknya realistis untuk bisa dicapai dan dapat terlaksana dalam pengembangan kerja sama dan kemitraan sekolah.

d. Rencana Kerja dan Biaya untuk Pencapaian Tujuan

Bagian ini memuat uraian rencana kerja sama dan kemitraan dan alokasi pembiayaan untuk mencapai tujuan. Uraian rencana kerja atau rencana kegiatan dikelompokkan dalam bidang kerja sama dan kemitraan, antara lain:

- 1) kerja sama dan kemitraan dengan Lembaga Perguruan Tinggi;
- 2) kerja sama dan kemitraan dengan sekolah lain, baik dalam maupun luar negeri;

- 3) kerja sama dan kemitraan dengan dunia usaha dan industri;
- 4) kerja sama dan kemitraan dengan masyarakat;
- 5) kerja sama dan kemitraan dengan alumni.

e. Jadwal Pelaksanaan Rencana Kerja

Bagian ini memuat rancangan jadwal setiap rencana kerja yang telah disusun pada tahun pelajaran yang berjalan.

f. Penanggung jawab Kegiatan

Bagian ini melampirkan Surat Kepala Sekolah tentang penanggung jawab setiap bentuk kerja sama dan kemitraan untuk melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bentuk kerja sama masing-masing.^{xxx}

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2001. *Filsafat Ilmu*. Bandung: Rosdakarya.
- Abuddinata. 2003. *Manajemen Pendidikan*. Bogor: Kencana.
- Anderson, P.S., dan W.L. McCarty. 1998. *Potofisiologi*. Jakarta: EGC.
- Ardianto, Elvinaro dan Soleh Soemirat. 2004. *Dasar-dasar Public Relations*. Cetakan Ke-3. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arif, Mohammad. 2010. *Teknologi Pendidikan*. Kediri: STAIN Kediri Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan*. Cet. Ke-1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asnawir. 2006. *Manajemen Pendidikan*. Padang: IAIN IB Press.
- Asnawir dan M. Basyiruddin Usman. 2002. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Ciputat Pers.
- _____. 2005. *Administrasi Pendidikan*. Padang: IAIN IB Press.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Management Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bachtiar, Wardi, 1997. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos.
- Bafadal, Ibrahim. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bahtiar, Yoyon. 2010. *Bahan Kuliah Perencanaan Pendidikan*. Bandung: UPL.
- Bennis, Warren G. 1969. *Organizational Development, Its Nature, Origins and Prospects*. Addison Wesley: Reading Mass.

- Benty, D.D.N. dan I. Gunawan. 2015. *Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat*. Malang: UM Press.
- Boediono. 1994. *Pendidikan dan Latihan dalam Periode Tinggal Landas*. *Mimbar Pendidikan*, No. 1 Tahun XIII.
- _____. 1998. *Panduan Manajemen Sekolah*. Jakarta: Direktur Pendidikan Menengah Utama.
- Bryson dan John M. 2008. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bryson, M. 2001. *Perencanaan Strategis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Callaway, A. 1971. *Educational Planning and Unemployed Youth*. In C. E. Beeby (Ed.). *Planning and the Educational Administrator*. Paris: International Institute for Educational Planning UNESCO.
- Coombs, P.H. 1967. *What is Educational Planning! (Istiwidayanti, Trans.)*. In C. E. Beeby (Ed.). *Planning and the Educational Administrator*. Jakarta: Bhartara Karya Aksara dan UNESCO: Lembaga Internasional untuk Perencanaan Pendidikan.
- Cunningham. 1983. *Systematic Planning for Educational Change*. United States of America: Mayfield Publishing Company.
- Dakir. 2004. *Perencanaan dan Pengembangan kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Davis. et.al. 1980. *Issues and Problem in Planning of Education in Developing Countries*. Cambriges: CSED.
- Dertouzas, M.L. et.al. 1989. *Made in America: Regaining the Productive Edge*. Cambridge, MA: Harper Perennial.
- Didin, Kurniadi dan Imam Machali. 2013. *Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Engkoswara dan Aan Komariah. 2011. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Enoch, Yusuf. 1995. *Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fattah, Nanang. 2001. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2006. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2008. *Landasan Manejemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Gaffar, Mohammad Fakry. 1987. *Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi*. Jakarta: P2LPTK.
- Gallagher, Kenneth T. 1994. *Epistemologi: Filsafat Pengetahuan*. Terjemahan P. Hardono Hadi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hamalik, Oemar. 2006. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Handoko, T. Hanl. 1995. *Manajemen*. Yogyakarta: BFE.
- Harbison, F. 1967. *Educational Planning and Human Resource Development (Soeheba K. Trans)*. In C.E. Beeby (Ed.) *Planning and the educational administrator*. Paris: UNESO.
- Hardjosoedarmo, Soewarso. 2003. *Total Quality Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Andi.
- Hasan, Alwi. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasan, S. Hamid. 2013. *Workshop/Kurikulum 2013 di SMP 19/Materi Pelatihan IPS Kur 2013/Penyegaran Narsum 2013*. Jakarta: 26-28 Juni 2013.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hicks, Herbert G. 1972. *The Management of Organization and Human Resources Approach*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Hidayat, Nadang dkk. 2016. *Kemitraan Sekolah dengan Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta: Ditjen PAUD & Penmas. Kemendikbud.
- Hikmat. 2009. *Manajernent Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Imron, Ali. 2004. *Persepektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Izzaty, Anisah. 2013. *Inovasi dalam Bidang Kurikulum 2013 dan Mutu Pendidikan* dalam <http://Izzatyalmuhyi.blogspot.com> (on line) diakses pada tanggal 5 Desember 2013.
- Johnson, Richard A. et.al. 1973. *The Theory and Management of System*. New York: Mc Graw-Hill.
- Joni T., Raka. 1983. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: P3LPTK.
- Kaufman, Rager A. 1973. *Educational System Planning*. New Jersen: Prentic Hall, Inc.

- _____. 2005. *Perencanaan Pendidikan Parsipatori*. Cet. III. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Prasetya. 2003. *Filsafat Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Preedy, Margaret. 1993. *Managing the Effective School*. London: Open.
- Raza, Moonis. 1985. *Educational Planing a Log Term Perspective*. Needelhi: National Institute Planing and Administration.
- Revida, Erika. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur di Indonesia*. Medan: FISIP Universitas Sumatera Utara.
- Rohiat. 2010. *Manajemen Sekolah (Teori Dasar dan Praktik)*. Bandung: Refika Aditama.
- Rosady. 2010. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis; Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Rowe et.al. 1990. *Strategic Management: a Methodological Approach*. Canada: Addison Wesley Publishing Company.
- Rowley, D.J. et.al. 1997. *Strategic Change in Colleges and Universities: Planning to Survive and prosper*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Rusdiana, A. dkk. 2014. *Asas-asas Manajemen Berwawasan Global*. Bandung: Pustaka Setia.
- _____. 2015. *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- _____. 2015. *Pendidikan Profesi Keguruan*. Bandung: Pustaka Setia.
- _____. 2015. *Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung: Pustaka Setia
- _____. 2016. *Pengembangan Organisasi Lembaga Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sagala, Syaiful. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Nimas Multima.
- _____. 2005. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2009. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sahertian, Piet A. dan Ida M. Sahertian. 1994. *Dimensi Administrasi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sanyal, B.C. 2011. *Education and Employment*. In E.b.M.B. a. N.V.Varghese (Ed.), *Directions in Educational Planning International Experiences and Perspectives*. Paris: International Institute for Educational Planning UNESCO.
- Saputra, Bayu. 2015. *Analisis Manajemen Sarana dan Prasarana*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Saud, Udin Syaefudin dan Abin Syamsuddin Makmun. 2007. *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Siagian, Harbangan. *Administrasi Pendidikan Suatu Pendekatan Sistem*. Cet. I. Semarang: Satya Wacana.
- Sidi, Indra Djati. 2001. *Menuju Masyarakat Belajar (Menggagas Paradigma Baru Pendidikan)*. Jakarta: Paramadina.
- Simamora, Henry. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Bagian Penerbit STIE YKPN.
- Simanjuntak, P., 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE-UI.
- Siswanto. 2011. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soenarya, Endang. 2000. *Pengantar Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Soetopo, Hendyat dan Wasty Soemanto. 1982. *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sonhadji, A. dan M. Huda. 2014. *Asesmen Kebutuhan, Pengambilan Keputusan, dan Perencanaan*. Malang: Univ. Negeri Malang.
- St. Rodliyah. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. Jember: Pustaka Pelajar.
- Steiner, George A. 1997. *Kebijakan dan Strategi Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

- Stoner, James A.F. dan Charles Wankel. 2003. *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan dalam Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjana. 2002. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suriasumantri, Jujun. 1997. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. 1981. *Ilmu dalam Prespektif*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Suryadi, A. 1995. *Kebijaksanaan Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia: Transisi Menuju Era Indonesia Modern*. Jakarta: Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.
- Suryadi, A. dan Wiana Mulyana. 1993. *Kerangka Konseptual Mutu Pendidikan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Guru*. Jakarta: Cardimas Metropole.
- Suryosubroto. 2004. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutisna, Oteng. 1979. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Jamaras.
- Suyitno, Y. 2009. *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Swata, Basu dan Irawan. 2003. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Liberty.
- Syahril, dkk. 2009. *Profesi Kependidikan*. Padang: UNP Press.
- Syaodih, Nana. 2009. *Pengembangan Kurikulum. Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syarief, Hamid. 1993. *Pengembangan Kurikulum*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah.
- Tafsir, Ahmad. 2004. *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tilaar, H.A.R. 1998. *Manajemen Pendidikan Nasional (Kajian Pendidikan Masa Depan)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Dosen Adpen UPI. 2012. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1992. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Masagung.
- Trisnawati, Sule Erni dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana.
- Umaedi. 1999. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Uno, Hamzah B. 2006. *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. 2010. *Manajemen: Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Edisi 3. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usmara, A. (Ed.). 2002. *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Amara Books.
- Ustman, Kahar dan Nadhirin. 2008. *Perencanaan Pendidikan*. Kudus: STAIN Kudus.
- Vebrianto. 1982. *Pengantar Perencanaan Pendidikan*. Yogyakarta: Paramita.
- Warijan. 1984. *Dinamika Kelompok dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Dirjen Dikti/Proyek P2LPTK.
- Wena, M. 1997. *Pendidikan Kejuruan Sistem Ganda*. Malang: IKIP Malang.
- Werther, William B. dan Keith Davis. 1996. *Manajemen Personalial dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Wina Sanjaya. 2009. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Wursanto. I.G. 1987. *Pokok-pokok Perencanaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Z., Arifin 2010. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2012. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zaini, Muhammad. 2009. *Pengembangan Kurikulum*. Yogyakarta: Teras.

PROFIL PENULIS



Dr. H. A. Rusdiana, Drs., MM, dilahirkan di Puhun Ciamis, tanggal 21 April 1961. Ia merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara pasangan Bapak Sukarta (Alm), dengan Ibu Junirah. Sejak kecil ia mengikuti orang tua di Dusun Puhun Desa Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis. Ia menamatkan Sekolah Dasar di SD Cinyasag I, tahun 1975,

Madrasah Tsanawiyah di Panawangan Ciamis lulus tahun 1979, Madrasah Aliyah Bandung lulus 1982, S-1 Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1987, S-2 Magister Manajemen (MM) Jakarta lulus tahun 2002, dan menyelesaikan S-3 Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Universitas Islam Negeri Bandung, lulus tahun 2012. Ia Menulis Disertasi berjudul "Implementasi Kebijakan WADALBIN Menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi Sesuai dengan moto hidupnya "belajar dan mengabdikan", ia mengajar sebagai dosen pada jurusan, Manajemen Pendidikan Islam Fak. Tarbiyah dan Keguruan dan Pascasarjana UIN Bandung. Sampai saat ini ia telah menulis buku ajar di antaranya *Pengantar Manajemen (Tresna Bhakti, 2002); Manajemen SDM (Tresna Bhakti, 2007); Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Tresna Bhakti, 2008); Pendidikan Kewarganegaraan (Tresna Bhakti, 2009); Sosiologi Pendidikan (Batic 2010); Antropologi Pendidikan (Batic 2011); Kebijakan Pendidikan (Lemlit UIN SGD, 20014); Organisasi Lembaga Pendidikan (PPs UIN SGD, 2015); Manajemen Kantor (Lemlit UIN SGD, 2016).*

Buku teks: *Dasar-Dasar Manajemen (Pustaka Tresna Bhakti Bandung, 2002); Manajemen Sumber Daya Manusia (Pustaka Tresna Bhakti, 2006); Manajemen Sumber Daya Manusia (Arsad Bandung, 2012); Manajemen Kewarganegaraan Kontemporer (Arsad, 2012); Pendidikan Kewarganegaraan (Insan Komunitas Bandung, 2012); Membangun Desa Peradaban Berbasis Pendidikan (Insan Komunitas Bandung, 2012); Manajemen Kewarganegaraan (Arsad Bandung, 2013); Manajemen Keuangan Sekolah (Arsad Bandung, 2013); Konsep Integritas Pendidikan (Bandung, 2014); Kewarganegaraan (Pustaka Setia, 2014); Manajemen Perkantoran Modern (Insan Komunitas, 2014); *Asas-asas Manajemen Berbasis Global (Pustaka Setia, 2014); Sistem Informasi Manajemen (Pustaka Setia, 2014); Manajemen Operatif (Pustaka Setia, 2014); Pendidikan Nilai (Pustaka Setia, 2014); Kebijakan Pendidikan (Pustaka Setia, 2015); Pendidikan Multikultural (Pustaka Setia, 2015); Evaluasi Pembelajaran (Pustaka Setia, 2015); Manajemen Konflik (Pustaka Setia, 2015); Pengelolaan Pendidikan (Pustaka Setia, 2015); Pendidikan Profesi Keguruan (Pustaka Setia, 2015); Manajemen Pendidikan dan Pelatihan (Pustaka Setia, 2015); Manajemen Perubahan (Pustaka Setia, 2016); Pengembangan Organisasi Lembaga Pendidikan (Pustaka Setia, 2016); Sistem Pemikiran Manajemen Pendidikan (Pustaka Setia, 2017); Komunikasi Informatika Teknologi Pendidikan (Pustaka Setia, 2017); Manajemen Evaluasi Program Pendidikan (Pustaka Setia, 2017).**

Penelitian: *Strategi Pengembangan IAIN Bandung (Tesis, 2000; Profil Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung (Stu Analisis tentang Latar Belakang Potensi, Model Motivasi Pengembangan Diri Mahasiswa, 2009); Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) (Penelitian di MTs Al-Mishbah Cipadung Kec. Cibiru Kota Bandung, 2010); Strategi Akselerasi Peningkatan Mutu Jurusan/Program Studi di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung, 2011; Implementasi Kebijakan WADALBIN menuju Akuntabilitas PT. (Disertasi, 2012); Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Keterampilan Wirausaha Produk Berketan (di Desa Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis, 2012); Stu Evaluatif Pembelajaran MK Ke-Islaman di Fak. Sains dan Teknologi UI SGD, 2013; Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Belajar Usah (KBU) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tresna Bhakti Ds. Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis, 2013; Penerapan Pendidikan Karakter melalui Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan (PAKEM) di MTs Al-Mishbah Cipadung Bandung, 2014; Perubahan*

Perilaku Sosial Keagamaan di Desa Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis, 2015; Implementasi Kebijakan EMIS, menuju Akuntabilitas PTIK Jabar-Banten, 2016.

Di samping itu, ia tak luput dari pengabdian kepada masyarakat untuk membina dan mengembangkan Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Mishbah Cipadung-Bandung yang mengembangkan pendidikan Diniah, RA, MI dan MTs, sejak tahun 1984-sekarang, serta garap lulus melalui Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat Tresna Bhakti, yang didirikannya sejak tahun 1994 dan sekaligus sebagai Ketua Yayasan, kegintarnya pembinaan dan pengembangan asrama mahasiswa pada setiap tahunnya tidak kurang dari 50 mahasiswa di Asrama Tresna Bhakti Cibiru Bandung. Ia juga membina dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tresna Bhakti sejak tahun 2007. Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan Ciamis.¹⁴⁴